

Katalog : 4102004.3175

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA JAKARTA UTARA

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAKARTA UTARA**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA JAKARTA UTARA

2022

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA JAKARTA UTARA 2022

ISSN : -
No Publikasi : 31750.2117
Katalog : 4102004.3175
Ukuran Buku : 29,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman : xii + 60 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara
Penyunting : Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara
Desain Kover : Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara

Sumber Ilustrasi : www.freepik.com
Pencetak : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Favten Ari Pujiastuti, S.Si., SST, ME.

Penanggung Jawab Teknis :

Nani Suciati SE

Penyunting:

Nani Suciati SE

Penulis:

I Made Widiguna, SST

Tata letak dan Infografis:

I Made Widiguna, SST

Gambar Kulit:

I Made Widiguna, SST

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Utara 2022 merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara. Publikasi ini menyajikan data dan analisis deskriptif ringkas mengenai gambaran umum kesejahteraan rakyat di Kota Jakarta Utara.

Cakupan pembahasan, meliputi aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan teknologi informasi, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta kemiskinan dan kriminalitas.

Pada tahun 2022 ini, pandemi COVID-19 sudah mulai surut sehingga kehidupan masyarakat mulai pulih. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan khususnya bagi pemerintah dalam upayanya membangkitkan perekonomian, keadaan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2022

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAKARTA UTARA**
Kepala,

FAVTEN ARI PUJIASTUTI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Jenis dan Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. KEPENDUDUKAN	7
2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk	8
2.2 Status dan Usia Perkawinan	13
2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran	13
BAB III. PENDIDIKAN	15
3.1 Buta Huruf	16
3.2 Partisipasi Sekolah	18
3.3 Partisipasi Murni	19
3.4 Tingkat Pendidikan	21
3.5 Rata-rata Lama Sekolah	22
3.6 Harapan Lama sekolah	23
BAB IV. KETENAGAKERJAAN	25
4.1 Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan	26
4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	27
4.3 Pengangguran Terbuka	28
BAB V. KESEHATAN	31
5.1 Angka Kematian Bayi	32
5.2 Umur Harapan Hidup	34
5.3 Penolong Kelahiran	34
5.4 Keluhan Kesehatan	36
BAB VI. PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI	37
6.1 Luas Lantai	38
6.2 Jenis Atap Rumah	39
6.3 Fasilitas Rumah	41
6.4 Teknologi Komunikasi dan Informasi	44
BAB VII. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA	47
7.1 Distribusi Pendapatan, Gini Rasio, dan Kriteria Bank Dunia	48
7.2 Pengeluaran per Kapita menurut Jenis Pengeluaran	49
BAB VIII. KEMISKINAN DAN INDIKATOR LAINNYA	53

8.1 Kemiskinan	53
8.2 Kriminalitas	57
BAB IX. PENUTUP	59

<https://jakutkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB V. KESEHATAN	
5.1 Jumlah Bayi yang Lahir Hidup, Mati dan Jumlah Balita Mati di Jakarta Utara Tahun 2018	33
BAB VI. PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI	
6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Jakarta Utara, 2017-2021 (Persen)	42
6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kota Jakarta Utara, 2017 – 2021 (Persen)	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB II. KEPENDUDUKAN

- | | |
|--|----|
| 2.1. Jumlah Penduduk Kota Jakarta Utara menurut Kecamatan Tahun 2022 (orang) | 8 |
| 2.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Utara 2022 (Jiwa/Km ²) | 9 |
| 2.3. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia di Kota Jakarta Utara, 2022 | 11 |
| 2.4. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Utara, 2021 dan 2022 | 12 |
| 2.5. Persentase penduduk berumur 15-49 tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2022 (Persen) | 13 |
| 2.6. Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, 2022 (Persen) | 14 |

BAB III. PENDIDIKAN

- | | |
|---|----|
| 3.1. Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2022 (Persen) | 17 |
| 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Utara Tahun 2022 (Persen) | 19 |
| 3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Utara Tahun 2022 (Persen) | 20 |
| 3.4. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Jakarta Utara Tahun 2022 (Persen) | 21 |
| 3.5. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jakarta Utara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (tahun) | 22 |
| 3.6. Harapan Lama Sekolah di Kota Jakarta Utara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (tahun) | 23 |

BAB IV. KETENAGAKERJAAN

- | | |
|--|----|
| 4.1. Diagram Ketenagakerjaan | 26 |
| 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jakarta Utara, Agustus 2020 - Agustus 2022 (Persen) | 28 |
| 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jakarta Utara, Agustus 2020 - Agustus 2022 (Persen) | 29 |

BAB V. KESEHATAN

- | | |
|--|----|
| 5.1. Jumlah Imunisasi Dasar Lengkap pada anak di Puskesmas Jakarta Utara, 2022 (Persen) | 33 |
| 5.2. Umur Harapan Hidup di Kota Jakarta Utara, 2011-2022 | 34 |
| 5.3. Persentase Penduduk Perempuan berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran, Tahun 2022 (Persen) | 35 |
| 5.4. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Menyebabkan Terganggu Aktivitasnya menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022 (persen) | 36 |

BAB VI. PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

- | | |
|---|----|
| 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan Kota Jakarta Utara, 2017-2021 (Persen) | 39 |
| 6.2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Kota Jakarta Utara, 2021 | 40 |
| 6.3. Persentase Rumah Tangga menurut Akses Listrik Kota Jakarta Utara, 2021 (Persen) | 41 |
| 6.4. Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Pompa/Sumur ke Penampungan Kotoran di Kota Jakarta Utara, 2021 (Persen) | 43 |
| 6.5. Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Memiliki Telepon Seluler Jakarta Utara, 2019 – 2021 (Persen) | 45 |
| 6.6. Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Kota Jakarta Utara, 2019 – 2021 (Persen) | 46 |

BAB VII. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

- | | |
|--|----|
| 7.1. Rasio Gini Kota Jakarta Utara dan Provinsi DKI Jakarta, 2018 -2020 | 49 |
| 7.2. Skema Pengeluaran Rumah Tangga | 50 |
| 7.3. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022 (persen) | 51 |
| 7.4. Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Golongan Pengeluaran per Kapita, Kota Jakarta Utara, 2022 (Persen) | 52 |

BAB VIII. INDIKATOR LAINNYA

- | | |
|---|----|
| 8.1. Tren Kemiskinan di Kota Jakarta Utara, 2017-2021 | 55 |
| 8.2. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kota Jakarta Utara (Rupiah/kapita/bulan), 2017-2020 | 56 |
| 8.3. Persentase Penduduk Menurut Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2020 (Persen) | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visinya yang dituangkan dalam “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

Mempunyai *share* terbesar dari sektor industri, Kota Jakarta Utara menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai kinerja pembangunan, agar kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang dapat mencapai sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sekaligus menjadi contoh bagi pembangunan di wilayah lain.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan salah satunya dapat dilakukan dengan melihat perkembangan indikator kesejahteraan rakyat, sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan. Apabila indikator yang ada menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja pembangunan relatif sudah mencapai sasaran yang dituju, demikian pula sebaliknya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dimaksud antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat secara umum, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi perumahan, dan sebagainya.

Kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, sementara data yang tersedia masih terbatas, sehingga tidak semua aspek yang mendukung kesejahteraan rakyat dibahas dalam publikasi ini. Aspek-aspek kesejahteraan yang akan diulas adalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan dan aspek lainnya.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Utara tahun 2021 ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial, sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk perencanaan pembangunan Kota Jakarta Utara selanjutnya.

1.3. Jenis dan Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Utara Tahun 2022 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan, tabel-tabel, dan gambar. Pada setiap bab disertakan ulasan, sehingga dapat diperoleh gambaran informasi yang terkait dengan topik bahasan pada bab yang bersangkutan. Tabel yang disajikan memuat beragam indikator, baik dalam bentuk jumlah, persentase maupun rasio.

Sumber data utama penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) ditambah data penunjang lainnya yang berasal dari survei dan sumber data lainnya.

a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Karakteristik penting kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga dan pendidikan dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) setiap tahun. Data yang lebih rinci, seperti konsumsi rumah tangga, perumahan, kesehatan, dan sosial budaya dikumpulkan melalui data sasaran (modul) yang dikumpulkan secara periodik, tiga tahun sekali.

b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang mencari kerja, dan sebagainya.

c. Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, biasanya di tahun yang berakhiran 0, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Sensus Penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

d. Survei Penduduk Antar Sensus

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Utara dikelompokkan dalam 9 bagian, yaitu: pendahuluan, kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, pendapatan dan pengeluaran, kemiskinan dan indikator lainnya, serta penutup.

Dalam Bab II Kependudukan, membahas sejumlah indikator penting antara lain pertumbuhan dan komposisi penduduk, status dan usia perkawinan, kelahiran dan kematian, serta pemakaian alat/cara KB.

Perubahan-perubahan pada indikator ini mencerminkan kecenderungan atau perubahan yang menyangkut kesejahteraan penduduk.

Bab III Pendidikan, membahas sejumlah indikator penting perkembangan pendidikan yang sering dikaitkan dengan indikator pembentuk kualitas sumber daya manusia.

Bab IV Ketenagakerjaan, membahas struktur ketenagakerjaan di Kota Jakarta Utara. Informasi yang terangkum di sini meliputi jumlah angkatan kerja, angka pengangguran, dan struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan. Pengaruh pandemi akibat Covid-19 terhadap penduduk usia kerja ditambahkan ke dalam satu subbag tersendiri.

Dalam Bab V Kesehatan, apakah derajat kesehatan masyarakat ibukota sudah baik atau belum, dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan yang akan dibahas di bab ini.

Bab VI Perumahan dan Teknologi Informasi, dalam bab ini akan dibahas beberapa indikator kualitas bahan bangunan rumah serta fasilitas yang digunakan serta penguasaan HP dan akses internet sebagai indikator pemanfaat teknologi.

Bab VII Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga, bab ini akan membahas aspek pendapatan, tingkat konsumsi rumah tangga dan pola konsumsi masyarakat.

Bab VIII Kemiskinan dan Indikator Lainnya akan membahas tingkat kemiskinan ibukota dan indikator lainnya.

Sedangkan Bab IX Penutup, merupakan ringkasan ataupun *highlight* beberapa indikator terpilih serta dampak pandemi COVID-19 terhadap beberapa indikator.

BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan aspek penting dalam pembangunan, karena penduduk merupakan subjek sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Selain sebagai pelaksana, penduduk juga merupakan sasaran akhir dari semua target program pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat diperlukan sebagai penunjang dalam menentukan arah kebijakan. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu kebijakan tersebut disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan yang lebih penting informasi perkiraan pada waktu yang akan datang.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data, berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan perhitungan proyeksi data kependudukan dari hasil sensus penduduk (SP) dan juga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang didalamnya termuat informasi kependudukan.

Kota Jakarta Utara yang menjadi sentra perindustrian terbesar di wilayah DKI Jakarta, memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar, namun disisi lain potensi sumber daya alam alam yang tersedia cukup minim, sehingga terciptalah berbagai peluang dan tantangan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi pendatang yang berjuang untuk mencari nafkah.

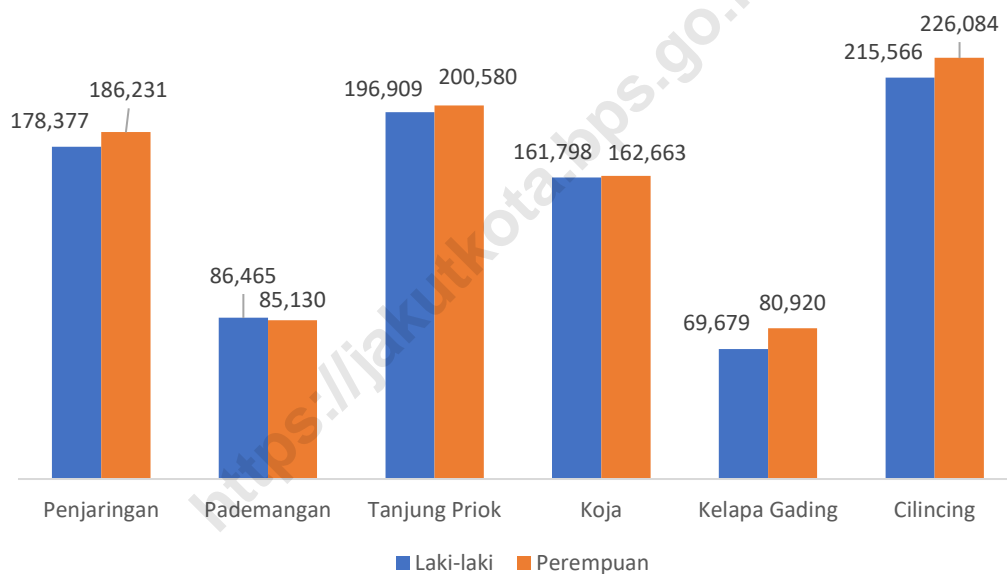
Penduduk Jakarta Utara merupakan modal dasar dalam pembangunan Kota. Namun demikian, jika jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik, dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya.

Penyediaan pangan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan permukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan permukiman kumuh, liar dan tidak layak huni.

2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Kota Jakarta Utara dengan luas 146,66 Km² didiami penduduk sebanyak 1.850.402 jiwa. Penduduk ini tersebar di 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Cilincing sebanyak 441.650 jiwa (23,87 persen), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Gading sebanyak 150.599 jiwa (8,14 persen).

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Kota Jakarta Utara Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022 (jiwa)



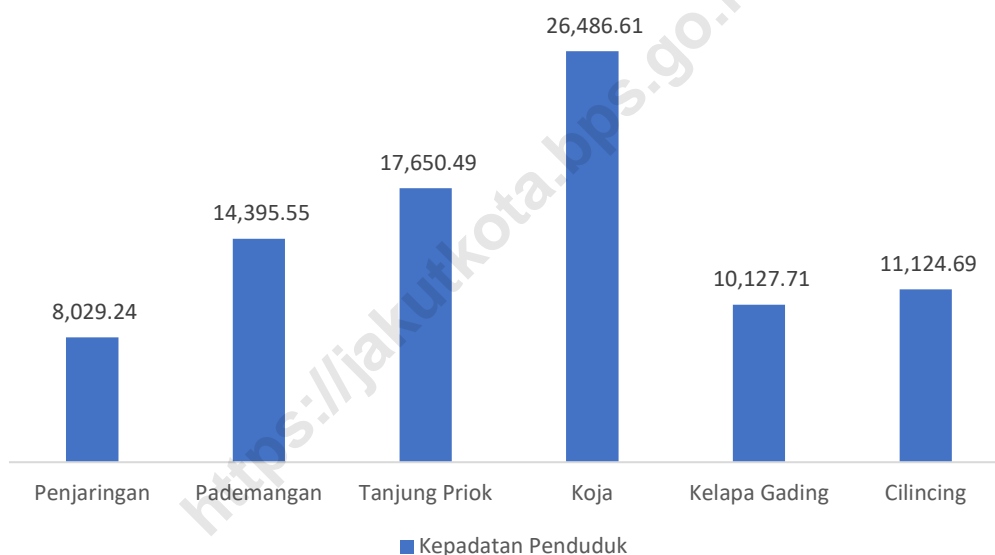
Sumber : Proyeksi Penduduk 2015 – 2045, Hasil SUPAS 2015, BPS

Jakarta Utara dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan hampir seluruh kecamatan memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kecamatan Pademangan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, Namun perbedaannya hanya sekitar 1.335 penduduk.

2.1.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kota Jakarta Utara memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena luas wilayahnya yang kecil dengan populasi penduduk yang cukup besar. Dengan luas wilayah 146,66 km² dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, berakibat pada meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Jakarta Utara. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk Jakarta Utara mencapai 12.616 jiwa/km²

Gambar 2.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Utara,
Tahun 2022 (Jiwa/Km²)



Sumber : Proyeksi Penduduk 2015 – 2045, Hasil SUPAS 2015, BPS

Kenaikan tingkat kepadatan penduduk di Kota Jakarta Utara terjadi di seluruh kecamatan. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 tertinggi terdapat di Kecamatan Koja yaitu 26.486 jiwa/km². Kecamatan yang relatif jarang penduduknya dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Jakarta Utara adalah Penjaringan dengan luas wilayah 45,41 km², kepadatan penduduk di tahun 2021 sekitar 8.029 jiwa/km².

2.1.2. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Angka ini dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin dapat pula dihitung untuk masing-masing kelompok umur.

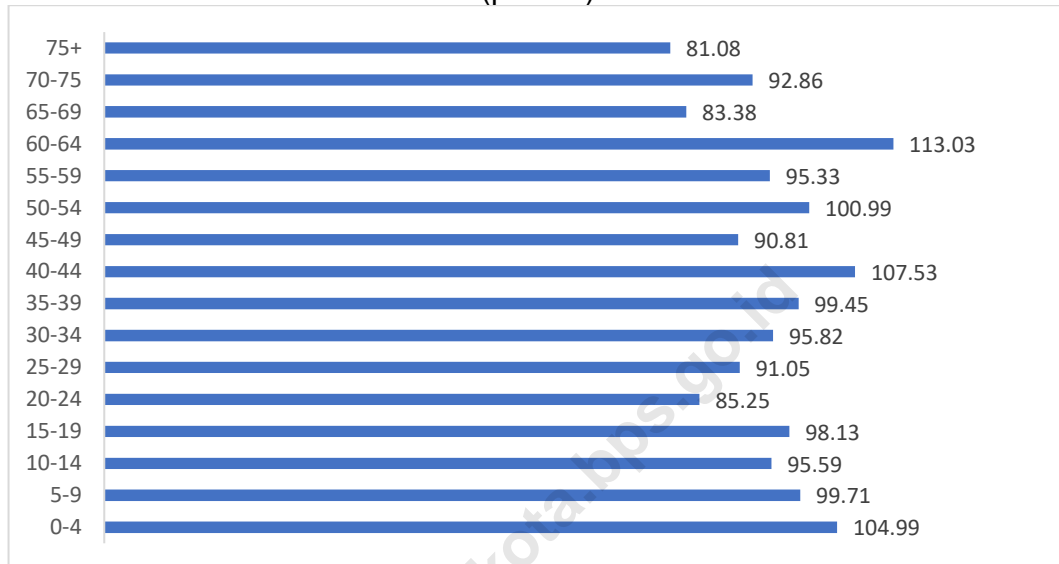
Melalui proses demografi, penduduk laki-laki biasanya lebih rentan dalam hal tingkat kesehatan. Penduduk laki-laki memiliki angka harapan hidup yang relatif lebih rendah dari pada angka harapan hidup penduduk perempuan. Di sisi lain penduduk laki-laki memiliki tingkat mobilitas yang lebih tinggi dari pada penduduk perempuan yang menyebabkan risiko terhadap kecelakaan, risiko dalam melakukan aktivitas relatif lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan aktivitasnya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja/mencari pekerjaan di tempat lain.

Berdasarkan angka proyeksi tercatat bahwa jumlah penduduk Kota Jakarta Utara pada tahun 2022 mencapai 1.850,40 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin 96,52 persen. Nilai rasio jenis kelamin 96,52 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin pada kelompok umur 5-9 tahun tercatat nilai rasio 99,17 yang memberi informasi bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut hampir sama antara laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini sebenarnya sesuai dengan teori demografi yang menyatakan pada kelompok umur 5-9 tahun pada umumnya lebih banyak perempuan, karena laki-laki lebih rentan terhadap masalah kesehatan sehingga kualitas ketahanan hidupnya/*(survival life)* lebih rendah dari pada perempuan.

Seimbangny penduduk laki-laki dan perempuan pada usia 5-9 tahun salah satunya disebabkan penanganan masalah kesehatan penduduk usia pendidikan dini di DKI Jakarta sudah baik. Karena sampai dengan saat ini Pemerintah DKI Jakarta masih terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, baik dalam hal penyediaan fasilitas

kesehatan maupun tenaga kesehatan. Penyebab lainnya adalah kesadaran para orang tua di DKI Jakarta dalam hal menjaga kesehatan anak sudah tinggi.

Gambar 2.3
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia di Kota Jakarta Utara, 2022
(persen)



Sumber : Proyeksi Penduduk 2015 – 2045, Hasil SUPAS 2015, BPS

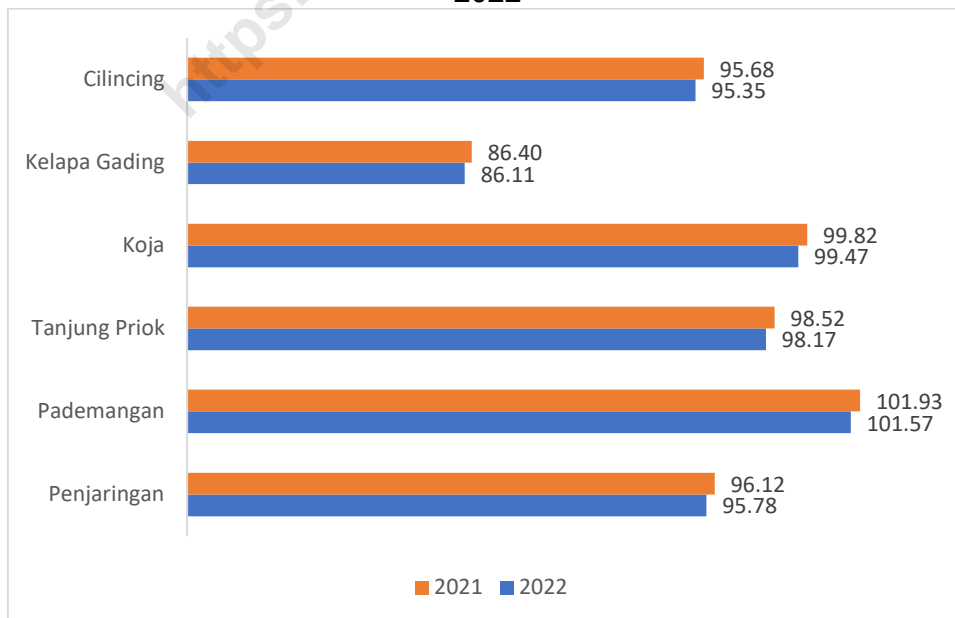
Dari Gambar 2.3, tampak bahwa beberapa kelompok umur yang memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100,00, seperti kelompok umur 5-39 tahun, 45-49 tahun, 55-59 tahun, 65-74 tahun, dan 75+ tahun. Kelompok rasio jenis kelamin diatas 100 terbagi menjadi beberapa kelompok juga yakni kelompok usia 0-4 tahun, 40-44 tahun, 50-54 tahun, dan kelompok usia 60-64 tahun.

Secara demografis dapat dijelaskan bahwa pada kelompok usia 15-34 tahun tersebut mobilitas penduduk akan lebih tinggi dari pada kelompok umur lainnya karena terkait dengan aktivitas kuliah dan mencari pekerjaan. Di samping itu, adanya migran masuk dari daerah lain ke DKI Jakarta yang bekerja pada sektor formal dan informal. Mereka pada umumnya bekerja pada sektor perdagangan, industri dan jasa-jasa. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk perempuan. Hal ini memberi kontribusi meningkatkan jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Pada Gambar 2.3 juga dapat dilihat, rasio jenis kelamin pada mulai kelompok umur 65-69 tahun sampai kelompok umur 75 tahun ke atas tercatat dibawah 100 persen. Hal ini mencerminkan ketahanan hidup laki-laki lebih rendah dari pada perempuan. Secara teoritis ketahanan hidup laki-laki pada usia lanjut lebih rentan daripada perempuan, sehingga umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari pada umur harapan hidup perempuan.

Bila diamati menurut Kecamatan (Gambar 2.4), Kecamatan Kelapa Gading memiliki rasio jenis kelamin terendah hanya sebesar 86,11. Kecamatan Pademangan menjadi satu-satunya Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin sendiri yakni 101,57. Selain itu Pademangan juga menjadi satu-satunya kecamatan yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuannya. Secara umum rasio jenis kelamin di seluruh kecamatan menurun pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021.

Gambar 2.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Utara, 2021 dan 2022

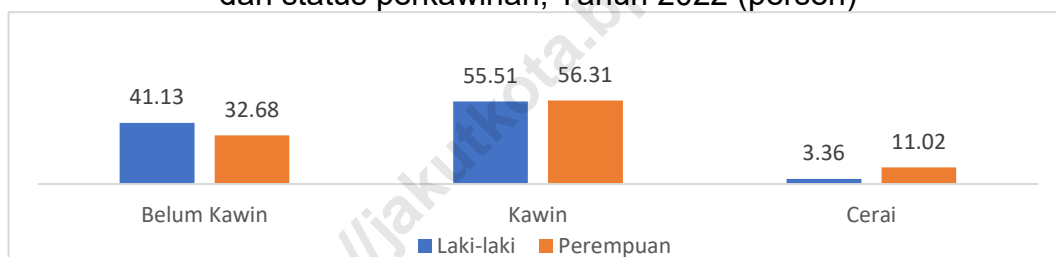


Sumber : Proyeksi Penduduk 2015 – 2045, Hasil SUPAS 2015, BPS

2.2 Status dan Usia Perkawinan

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dan kelompok umur sangat penting untuk diketahui, karena hal ini terkait dengan masalah fertilitas, usia perkawinan pertama untuk perempuan (UKP) dan masa reproduksinya, serta rata-rata anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH). Pengumpulan data fertilitas diperoleh dari perempuan pernah kawin (kawin, cerai mati, dan cerai hidup) dengan pertimbangan kejadian kelahiran di DKI Jakarta biasanya terjadi pada ikatan perkawinan, sehingga kejadian kelahiran pada perempuan yang belum kawin tetap diperhitungkan sebagai faktor penentu angka fertilitas. Wanita belum kawin tetapi pernah melahirkan dimasukkan dalam kelompok cerai hidup.

Gambar 2.5
Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan status perkawinan, Tahun 2022 (persen)



Sumber : Susenas Maret 2022

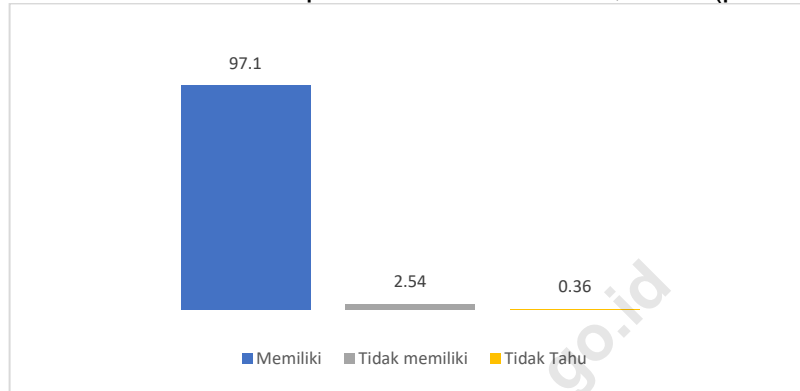
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 dapat memberikan gambaran proporsi penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati). Proporsi penduduk berstatus kawin masih mendominasi baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2022, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin masing-masing sebesar 55,51 persen dan 56,31 persen dan yang berstatus belum kawin 41,13 persen dan 32,68 persen.

2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk

memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Akta Kelahiran nantinya akan sangat berguna di masa depan dalam mengurus berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan lain-lain.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, 2022 (persen)



Sumber : Susenas Maret 2021

Dari gambar 2.7 menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 97,1 persen. Namun masih terdapat 2,54 persen penduduk umur 0 sampai dengan 17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran. Sementara sisanya kurang dari 1 persen tidak tahu.

B A B III

P E N D I D I K A N

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Negara dengan kualitas SDM yang baik akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan persaingan di percaturan perekonomian global.

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang diperlukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era globalisasi, SDM yang andal, tangguh, dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain sangat diperlukan agar bangsa kita dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan, diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 1984, kemudian ditingkatkan dengan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 1994. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, dampak positif dari program wajib belajar telah mampu mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Sejak tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta sudah menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya siswa SMA sederajat mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Kebijakan ini diimplementasikan dengan kebijakan SPP gratis pada seluruh tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas pada sekolah negeri di seluruh wilayah termasuk Kota Jakarta Utara.

Kebijakan di atas berimplikasi pada semakin banyak penduduk yang mampu menamatkan pendidikan dan secara tidak langsung turut memberi kontribusi pada penundaan usia anak-anak dalam memasuki bursa lapangan pekerjaan. Adanya pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

3.1. Buta Huruf

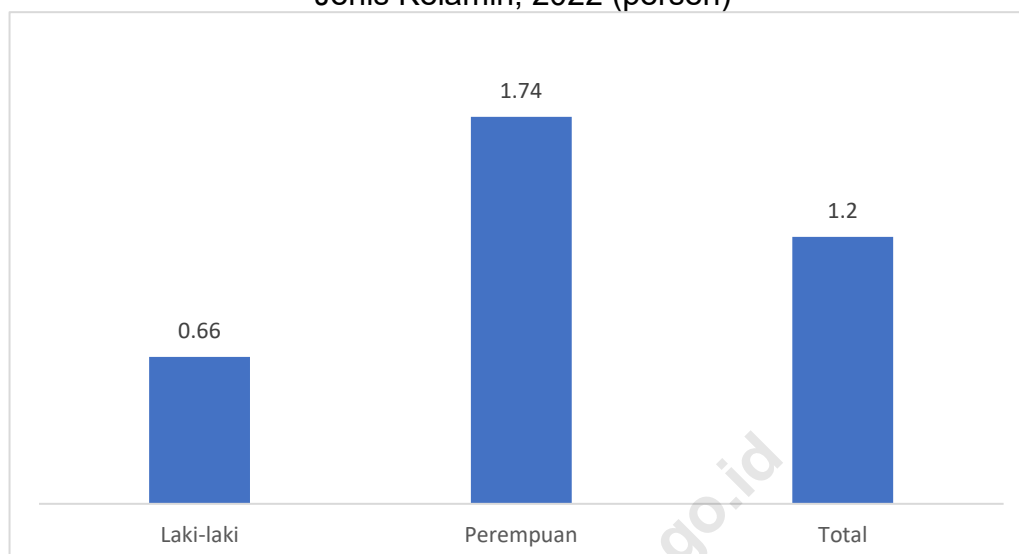
Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk secara umum. Tingkat buta huruf adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis terhadap jumlah seluruh penduduk.

Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki setiap individu. Berkaitan dengan ini, pemerintah berusaha agar seluruh penduduk bebas buta aksara. Usaha Pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar melalui jalur pendidikan formal dan program kejar Paket A dan B melalui jalur pendidikan informal di segala lapisan masyarakat, baik terhadap penduduk laki-laki maupun perempuan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka buta huruf (ABH) penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan angka buta huruf penduduk perempuan, masing-masing sebesar 0,44 persen dan 0,54 persen. Secara umum perubahan ABH yang terjadi dari tahun ke tahun pada kelompok umur ini, umumnya disebabkan oleh migrasi internal yang terjadi pada penduduk laki-laki, misalnya buruh pabrik yang berasal dari luar Jakarta yang tidak berpendidikan dan tidak bisa baca tulis bermigrasi ke kota Jakarta, sehingga menyebabkan angka buta huruf laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan perempuan.

Secara keseluruhan ABH di Kota Jakarta Utara berada di bawah 1 persen. Artinya posisi ini sudah dikategorikan *hard rock* sulit untuk diturunkan, dan cenderung berfluktuatif di sekitar angka tersebut. Kenaikan dan penurunan angka buta huruf yang terjadi lebih dipengaruhi oleh migrasi. Misalnya masuknya pendatang yang berpendidikan rendah seperti pramuwisma, pekerja sektor informal, dan lain-lain.

Gambar 3.1.
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut
Jenis Kelamin, 2022 (persen)



Sumber : Susenas Maret 2021

Salah satu hal yang turut berperan meningkatkan kemampuan baca tulis adalah dilaksanakannya program pendidikan non formal dengan diberlakukannya program Paket A, Paket B, SMP Terbuka, dan program penuntasan keniraksaraan lainnya.

Pemerintah telah bertekad untuk menangani masalah penduduk buta aksara secara tuntas. Jumlah buta aksara masih potensial untuk meningkat sebagai eksese masalah-masalah sosial-ekonomi yang berakibat pada putus sekolah. Oleh karena itu, program pendidikan keaksaraan menempati peran strategis karena diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah fundamental sumber daya manusia yang menyangkut berbagai aspek kepentingan.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti pemberian “Bantuan Operasional Sekolah” (BOS), “Bantuan Operasional Pendidikan” (BOP), Beasiswa untuk siswa miskin (BSM), dan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan membantu siswa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti membeli buku, pakaian seragam, dan uang saku/transpor.

3.2. Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

APS dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

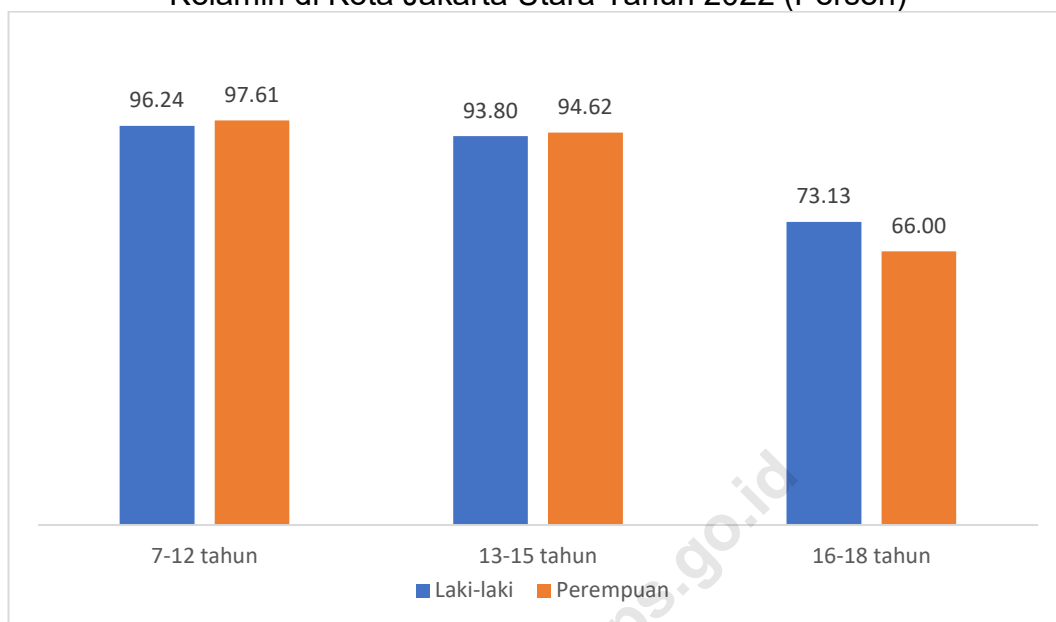
Indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia yang potensial di masa datang. Semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di masa datang juga semakin besar.

Dalam kurun waktu hingga saat ini tahun 2021, APS penduduk Kota Jakarta Utara secara umum sudah cukup tinggi. Hal ini sangat menggembirakan karena dengan meningkatnya partisipasi sekolah, diharapkan dapat meningkatkan *human capital* bangsa ini di masa mendatang.

Salah satu alasan capaian APS 2021 pada seluruh kelompok usia sekolah dari 7-12 tahun hingga usia 16-18 tahun menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan Pemerintah Pusat dan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdampak positif pada peningkatan minat dan partisipasi anak untuk tetap bersekolah.

Gambaran secara rinci Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2021 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Utara Tahun 2022 (Persen)



Sumber : Susenas Maret 2022

Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi sekolah terlihat semakin kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi penduduk yang kemampuan ekonominya terbatas, ada kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, disamping alasan lain seperti anak tidak minat sekolah, transportasi, dan sebagainya.

Diferensiasi jenis kelamin memperlihatkan, APS perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan APS laki-laki pada setiap kelompok usia sekolah. Namun demikian, pada tahun 2022, APS perempuan pada umur 13-15 tahun lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Selain itu, APS perempuan pada umur 7-12 tahun juga lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki.

3.3. Partisipasi Murni

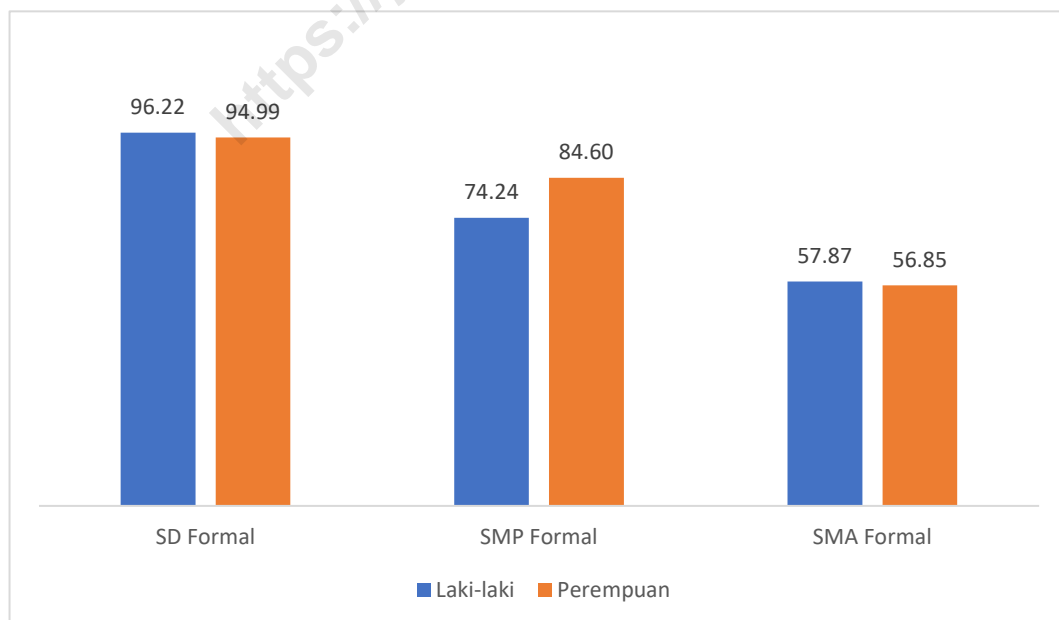
Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang memiliki pola yang relatif sama dengan APS dimana di jenjang SD APM lebih tinggi dibandingkan APM pada jenjang SMP dan SMA.

APM menggambarkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM SD tahun 2022 sebesar 96,22 persen untuk laki-laki dan 94,99 persen untuk perempuan. Sejalan dengan SD, APM SMA juga menunjukkan perempuan(56,85) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki(57,87). Untuk APM SMP sebesar 84,60 persen untuk laki-laki dan 74,24 persen untuk perempuan.

Gambar 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Utara Tahun 2022 (Persen)



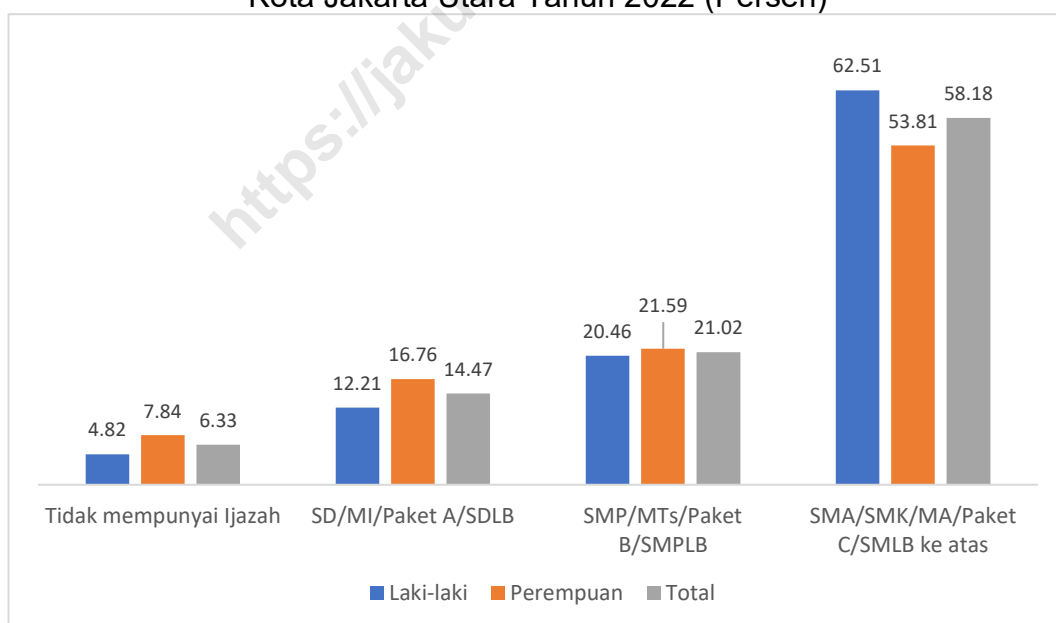
Sumber : Susenas Maret 2022

3.4. Tingkat Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktivitas seseorang dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada tahun 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA/ sederajat (di luar SMK/MAK) sebesar 58,18 persen, tingkat SMP/ sederajat sebesar 21,02 persen, tingkat SD/ sederajat sebesar 14,47 persen, dan tidak punya ijazah SD sebesar 6,33 persen.

Gambar 3.4
Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Jakarta Utara Tahun 2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret 2022

Persentase penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA/ perguruan tinggi, antara laki-laki dan perempuan cukup berimbang.

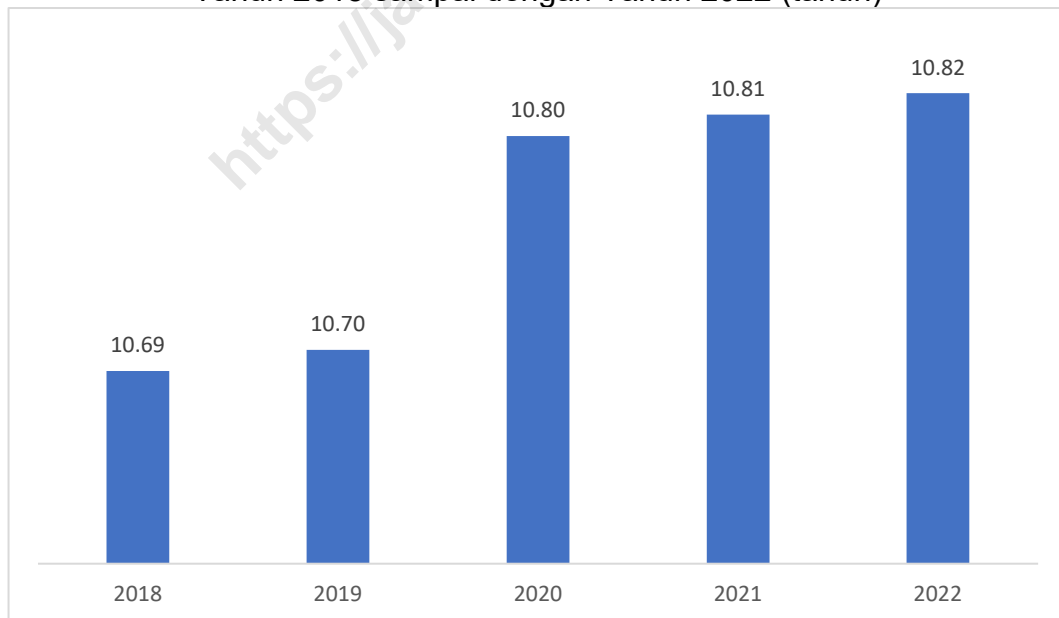
3.5. Rata-rata Lama Sekolah

Ada dua indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk yang sekaligus digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Secara umum RLS penduduk di Kota Jakarta Utara, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, RLS Kota Jakarta Utara sebesar 10,82 tahun, maknanya rata-rata penduduk Kota Jakarta Utara usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 10,82 tahun atau masuk kelas XI (kelas II SMA). Angka ini terus meningkat dibandingkan tahun 2018 yakni 10,69 tahun. Peningkatan RLS dalam 5 tahun terakhir mengindikasikan adanya perubahan yang baik dalam perkembangan pendidikan di Kota Jakarta Utara.

Gambar 3.5
Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jakarta Utara
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 (tahun)



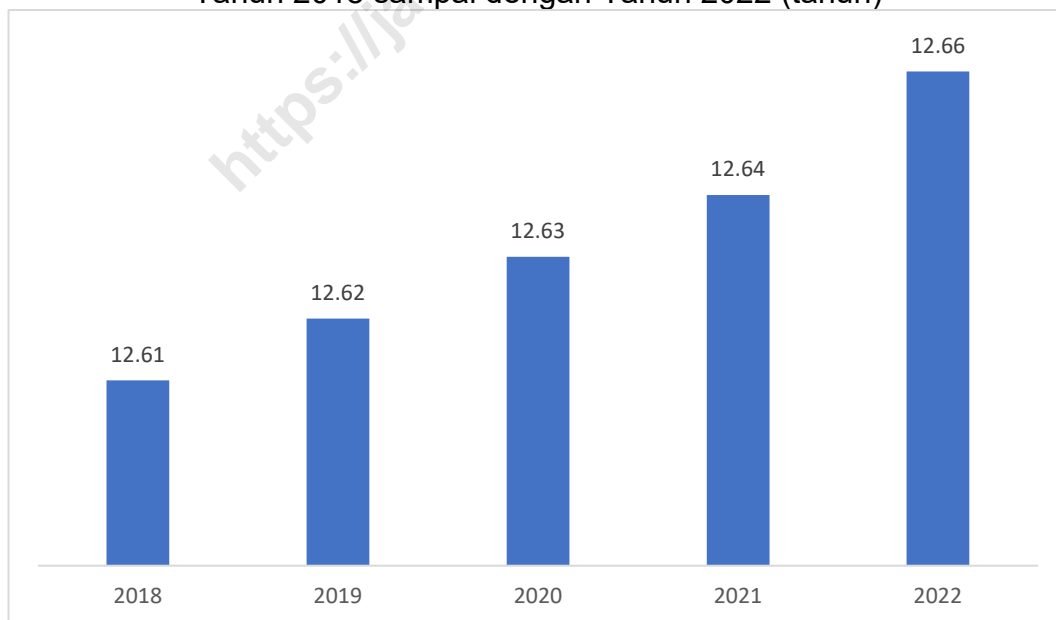
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

3.6. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2018, HLS Kota Jakarta Utara tercatat sekitar 12,61 tahun yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 12,61 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022, HLS Kota Jakarta Utara mencapai 12,66 tahun, meskipun hanya meningkat sedikit, peningkatan terus secara rutin terjadi setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Gambar 3.6
Harapan Lama Sekolah di Kota Jakarta Utara
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 (tahun)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Pembangunan manusia pada dasarnya ditujukan kepada manusia (*People-Centered-Development*). Oleh karena itu, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan kepada manusia baik sebagai objek maupun subjeknya. Aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan karena ketenagakerjaan tidak hanya berpengaruh pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial.

Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Perkembangan jumlah penduduk, sebagai akibat adanya perubahan tingkat kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk mempengaruhi struktur penduduk menurut umur. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya usia kerja dan angkatan kerja. Sebagai konsekuensinya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan selayaknya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja dan kemampuan berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk menampung ledakan penduduk usia produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Adanya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

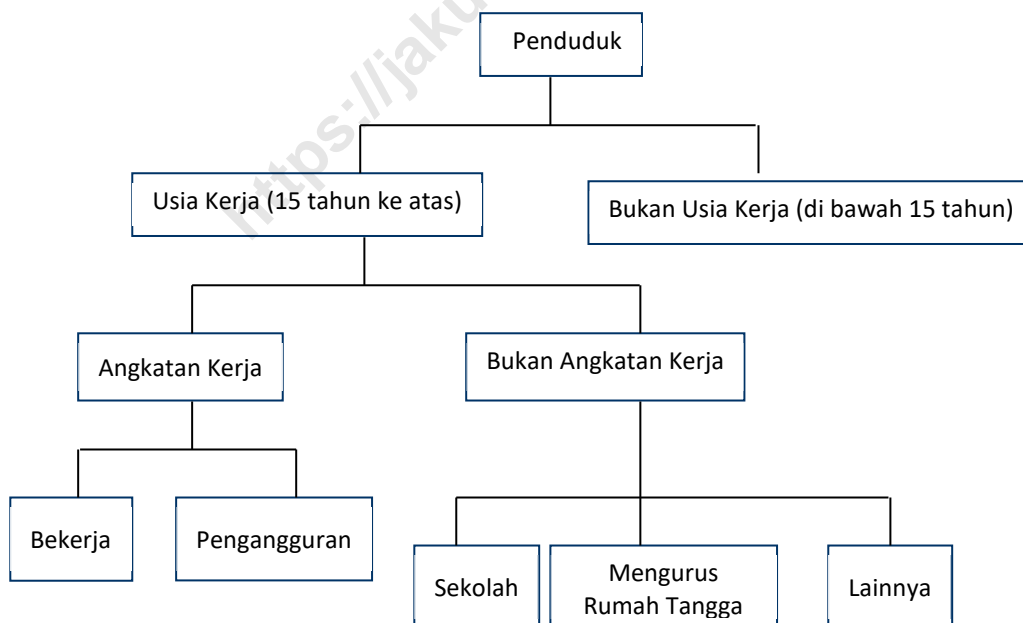
Datangnya pandemi COVID-19, membuat pemerintah harus mencari jalan terbaik, mengutamakan kesehatan tanpa mengabaikan perputaran kegiatan ekonomi dan sosial. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipilih oleh pemerintah dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Tentunya kebijakan ini sangat disadari akan mengurangi aktivitas usaha/perusahaan yang dapat berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja maupun produktivitas tenaga kerja dengan adanya pengurangan jam kerja.

Untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bagaimana dampak pandemi COVID--19 di DKI Jakarta, diperlukan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai keadaan ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan beberapa indikator ketenagakerjaan, seperti komposisi penduduk menurut jenis kegiatan, penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan serta jumlah pencari kerja.

4.1. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ketenagakerjaan digambarkan oleh diagram ketenagakerjaan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram Ketenagakerjaan



Sumber: Sakernas, BPS

Penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan bukan usia kerja adalah mereka yang

berusia di bawah 15 tahun (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003). Penduduk usia kerja dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi.

Struktur penduduk dalam kelompok angkatan kerja mencakup penduduk yang kegiatan utamanya bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya (pensiunan, orang jompo, orang cacat, penerima pendapatan dan lainnya). Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi.

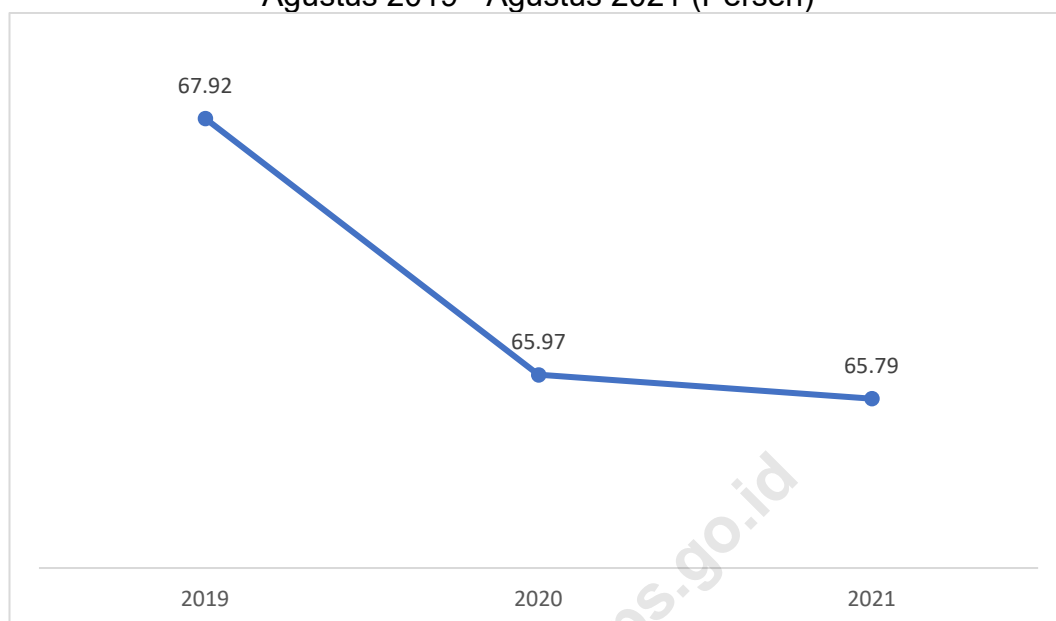
4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja adalah *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktivitas Ekonomi Umum) atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menggambarkan persediaan tenaga kerja dalam pasar kerja dan biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

Pada Agustus 2021, TPAK Jakarta Utara mencapai 65,79 persen. Hal ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir 65 orang diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 35 persen adalah bukan angkatan kerja.

Jika dicermati, selama periode Agustus 2019 - Agustus 2021, TPAK menunjukkan penurunan cukup besardi tahun 2020, kemudian terus menurun sedikit pada tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 dan 2021.

Gambar 4.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jakarta Utara,
Agustus 2019 - Agustus 2021 (Persen)



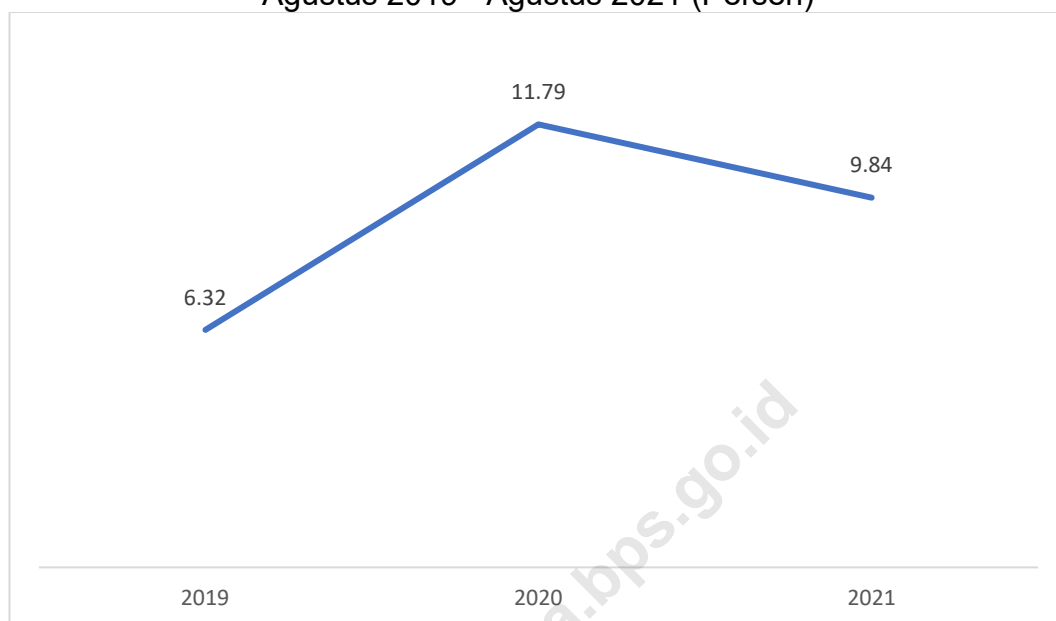
Sumber : Sakernas Agustus, 2019-2021

4.3. Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment rate*) merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator ini memberikan informasi tentang jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Selain pencari kerja, yang juga termasuk pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan tetapi mau menerima tawaran pekerjaan.

Pada Gambar 4.3, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jakarta Utara pada Agustus 2020 naik signifikan mencapai 11,79 persen atau naik 5,47 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama melejitnya kenaikan TPT. Namun, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, pada Agustus 2021 ini kembali menurun menjadi 9,84 persen atau turun minus 1,95 persen poin.

Gambar 4.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jakarta Utara,
Agustus 2019 - Agustus 2021 (Persen)



Sumber : Sakernas Agustus, 2019-2021

Pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengambil keputusan untuk memberlakukan kebijakan PSBB ataupun PPKM yang berdampak cukup serius terhadap perekonomian diantaranya terjadi PHK maupun pengurangan jam kerja sebagai resiko yang harus diterima. Namun demikian, pemerintah juga berusaha agar proses pemulihan ekonomi terus berjalan, disertai dengan gencarnya melaksanakan program vaksinasi. Hal ini menjadi pendorong meningkatnya TPT pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,79 dari sebelumnya 6,32 pada tahun 2019.

BAB V

KESEHATAN

Definisi kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Cara menjaga agar tubuh tetap sehat adalah dengan menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat, apalagi di tengah pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir.

Kesehatan adalah syarat yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan pendapatan yang layak. Penduduk yang sehat akan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga mampu mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan meningkatkan fasilitas serta akses kesehatan yang mudah dan terjangkau. Dengan demikian kesadaran penduduk untuk meningkatkan kesehatannya juga akan terwujud.

Meningkatnya fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta disebabkan banyak faktor salah satunya kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu penduduk tetap DKI Jakarta dan penduduk urban serta pendatang yang bekerja, melakukan kegiatan pendidikan dan bisnis di ibukota negara Republik Indonesia ini. Selain hal tersebut kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan kesehatan menyebabkan angka kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan juga meningkat, hal ini menuntut pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai dan berkualitas.

Kepedulian Pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan memberikan begitu banyaknya jaminan layanan kesehatan. Jaminan Layanan Kesehatan yang ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui UP. Jamkesda Provinsi DKI Jakarta adalah Jaminan layanan ambulans, Jaminan layanan darah PMI, Jaminan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan, dan jaminan layanan kesehatan korban kekerasan.

5.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai banyaknya bayi lahir hidup yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam waktu tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

AKB dapat menjadi cerminan yang jelas dan nyata dari kemajuan bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian. Dengan demikian, AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Lebih jauh lagi, AKB juga dapat digunakan untuk melihat gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan antenatal, serta status gizi ibu hamil.

Data jumlah kematian bayi didapatkan dari Dinas Kesehatan seksi kesehatan keluarga. Berdasarkan Tabel 5.1, jumlah bayi mati pada tahun 2018 ada sebanyak 555 dari 181.015 kelahiran. Angka Kematian (dilaporkan) tersebut belum bisa menggambarkan AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi.

Kota Jakarta Utara mencatat pada tahun 2018, Jumlah bayi lahir hidup sebanyak 32.655 atau sekitar 99,49 persen. 166 diantaranya adalah Meninggal saat baru dilahirkan dan 198 lainnya meninggal saat menginjak balita. Besarnya persentase lahir hidup sangat tergantung dari kesadaran masyarakat untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan kualitas lingkungan.

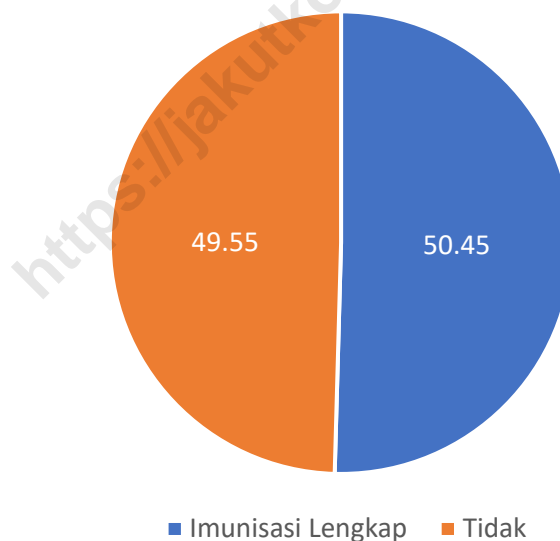
Tabel 5.1
Jumlah Bayi yang Lahir Hidup, Mati dan Jumlah Balita Mati
di Jakarta Utara Tahun 2018

Kab/Kota	Lahir Hidup	Bayi Mati	Balita Mati
(1)	(2)	(3)	(4)
Jakarta Utara	32.655	166	198

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Imunisasi merupakan upaya meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Idealnya, anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sejak berumur 12 bulan.

Gambar 5.1
Persentase Penduduk berumur 0-59 bulan yang Mendapatkan Imunisasi lengkap, 2022 (Persen)



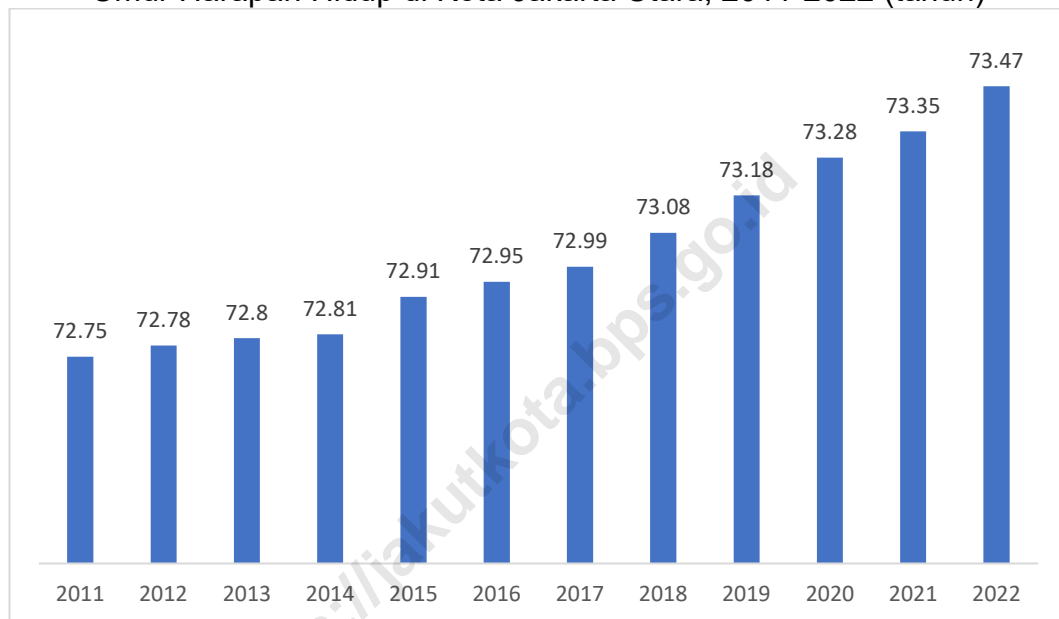
Sumber: Susenas 2022

Berdasarkan Gambar 5.1, sebanyak 50,45 persen anak usia 12-23 bulan sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para orang tua akan pentingnya imunisasi sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.

5.2 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)

Meningkatnya kualitas kesehatan, mendorong naiknya peluang hidup yang diharapkan oleh penduduk menjadi lebih panjang. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah batas usia yang diharapkan seseorang dapat bertahan hidup sejak lahir.

Gambar 5.2
Umur Harapan Hidup di Kota Jakarta Utara, 2011-2022 (tahun)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, IPM

Selama kurun waktu 2011 hingga 2022, angka UHH Kota Jakarta Utara terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2022, UHH di Jakarta mencapai 73,47 artinya seorang bayi baru lahir akan diperkirakan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 73 tahun. UHH mulai meningkat cukup tinggi pada tahun 2018 hingga 2022.

5.3 Penolong Kelahiran

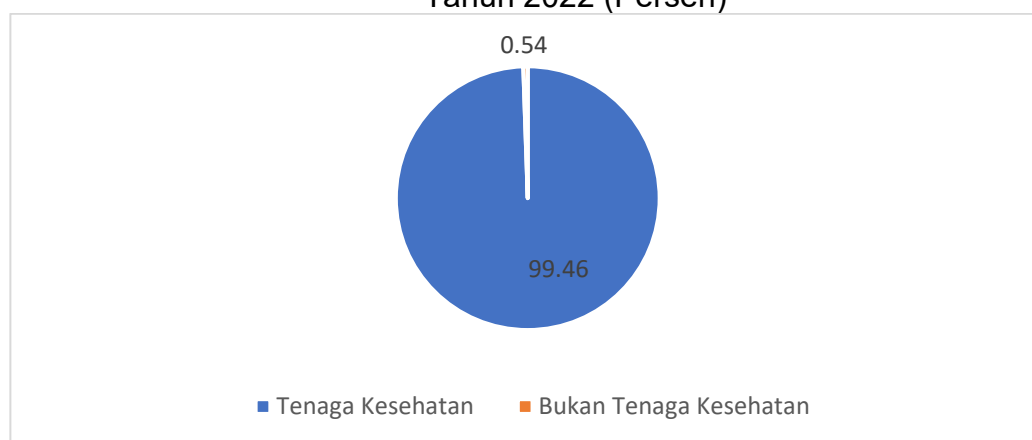
Proses kelahiran adalah proses akhir dari kehamilan dimana janin dikeluarkan dari kandungan ibu. Secara biologis, proses kelahiran yang dijalani seorang ibu dan janin merupakan proses yang penuh dengan berbagai risiko salah satunya adalah kematian ibu ataupun bayi.

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi selain pemeriksaan kehamilan, yaitu dengan mendorong ibu hamil agar setiap persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan medis. Tenaga medis mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan fasilitas kesehatan yang dinilai lebih baik dibandingkan tenaga non-medis sehingga mampu mencegah dan mengatasi berbagai kondisi darurat saat proses kelahiran.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penolong kelahiran. Penolong kelahiran meliputi dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga non-medis (seperti dukun beranak, famili/keluarga, dan lainnya). Ibu yang melahirkan dengan penolong kelahiran yang belum terlatih seperti tenaga non-medis memiliki risiko terjadinya kegagalan dalam persalinan yang lebih tinggi.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan jumlah tenaga medis penolong kelahiran memberikan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 99,46 persen ibu yang melahirkan ditolong oleh tenaga medis. Tingkat pendidikan yang semakin baik menjadikan seorang ibu menjadi lebih sadar akan pentingnya penolong kelahiran dalam menekan angka kematian ibu. Gambar 5.3 menunjukkan 99,46 persen ibu mempercayakan persalinannya ditolong oleh dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan tenaga medis lainnya.

Gambar 5.3
Persentase Penduduk Perempuan berumur 15-49 Tahun yang
Pernah Melahirkan dan Penolong Kelahiran Terakhir,
Tahun 2022 (Persen)



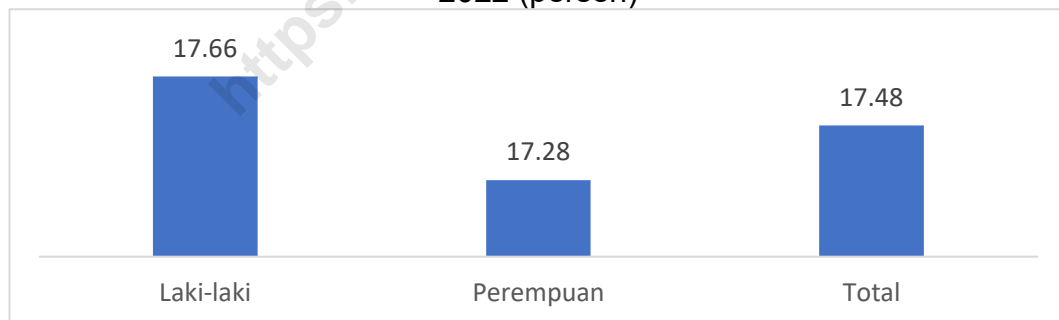
Sumber: Susenas 2022

5.4 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Berbagai butir pertanyaan yang tercakup antara lain jenis keluhan kesehatan panas, batuk, pilek, asma, napas cepat atau sesak, diare atau buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan keluhan kesehatan lainnya.

Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan mengindikasikan adanya gangguan kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap produktivitasnya. Indikator yang dapat dihasilkan dari butir pertanyaan ini adalah angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas merupakan indikator yang mengukur derajat kesehatan melalui adanya keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan tersebut.

Gambar 5.4
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Menyebabkan Terganggu Aktivitasnya menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022 (persen)



Sumber: Susenas, 2022

Pada tahun 2022, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sebesar 17,48 persen dimana persentase keluhan kesehatan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sehingga mengganggu aktivitas sekolah, bekerja, dan lain-lain sebesar 17,66 persen, sementara penduduk perempuan sebesar 17,28 persen.

BAB VI

PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, sebab seluruh kehidupan manusia berawal dari rumah. Rumah merupakan tempat yang bisa digunakan untuk berlindung dari cuaca yang tidak bersahabat, bahaya dan gangguan-gangguan lainnya. Tempat tinggal dan lingkungan yang baik merupakan hak setiap warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap, biasanya memiliki jalan masuk berupa pintu, bisa ada jendela ataupun tidak. Dalam kegiatan sehari-hari, orang biasanya berada di luar rumah untuk bekerja, sekolah, atau melakukan aktivitas lain, tetapi paling sedikit rumah berfungsi sebagai tempat untuk tidur bagi keluarga ataupun perorangan.

Dalam perkembangannya, rumah tidak hanya digunakan sebagai tempat berlindung tetapi rumah juga dapat menunjukkan tingkat sosial sebuah keluarga. Pemilihan lokasi tempat tinggal apakah itu di lingkungan kompleks, apartemen atau perkampungan bisa jadi menunjukkan tingkat sosial tersebut. Demikian juga pemilihan desain bangunan rumah. Apakah rumah tersebut didisain oleh arsitek tertentu dengan pemilihan bahan bangunan yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.

Kualitas rumah tinggal juga ditentukan oleh kualitas bahan bangunan serta fasilitas yang digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kualitas bahan bangunan rumah serta fasilitas yang digunakan, mencerminkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penghuninya. Sebab itu, kualitas dan fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan pada kenyamanan hidup sehari-hari. Fasilitas rumah yang dibahas dalam tulisan ini adalah luas lantai yang dipergunakan, sumber dan penggunaan air, jenis penerangan rumah, serta penanganan tempat pembuangan air besar/kotoran.

6.1 Luas Lantai

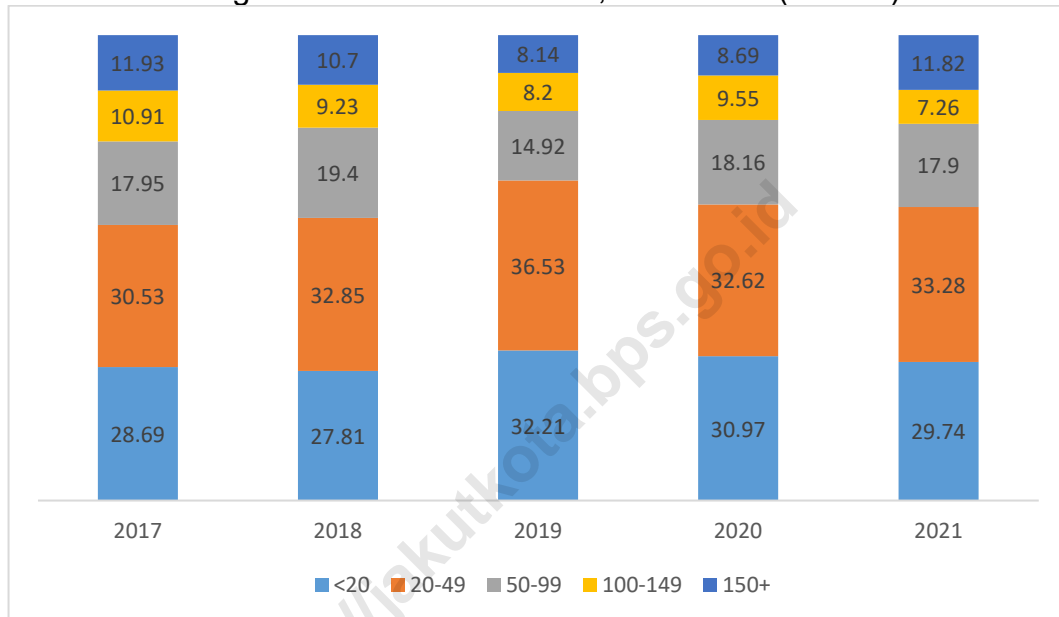
Luas lantai bangunan merupakan salah satu aspek yang membuat seseorang nyaman tinggal dalam suatu rumah. Luas rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan *overcrowded*. Hal ini berdampak kurang baik terhadap kesehatan penghuninya, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain.

Semakin luas rumah yang dihuni (tercermin dari luas lantai), semakin luas ruang gerak penghuninya. Luas lantai yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh anggota rumah tangga, termasuk di dalamnya teras, garasi, WC, dan gudang dalam satu bangunan. Tidak termasuk di dalamnya luas lantai bangunan untuk usaha, seperti untuk berdagang, buka salon atau lainnya.

Gambar 6.1 memperlihatkan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mayoritas rumah tangga yang ada di Kota Jakarta Utara menempati luas lantai antara 20 sampai dengan 49 m² sebesar 30 persen lebih. Persentase tertinggi berikutnya adalah luas lantai kurang dari 20 m² yang dihuni oleh 26-32 persen rumah tangga DKI Jakarta. Kelompok rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai lebih dari 100 m² adalah kelompok yang paling sedikit. Tingginya harga tanah dan mahalnya bahan bangunan konstruksi menyebabkan pilihan untuk tinggal di rumah yang luas semakin kecil.

Perkembangan yang terjadi selama 5 tahun terakhir tidak terlalu besar, Penduduk yang memiliki rumah dengan luas lantai kurang dari 50 m² selalu memiliki persentase tertinggi. Hal ini mengindikasikan masih banyak penduduk Kota Jakarta Utara yang belum tinggal di rumah yang layak.

Gambar 6.1
Perkembangan Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai
Bangunan Kota Jakarta Utara, 2017-2021 (Persen)



Sumber: Susenas Maret, 2021

6.2 Jenis Atap Rumah

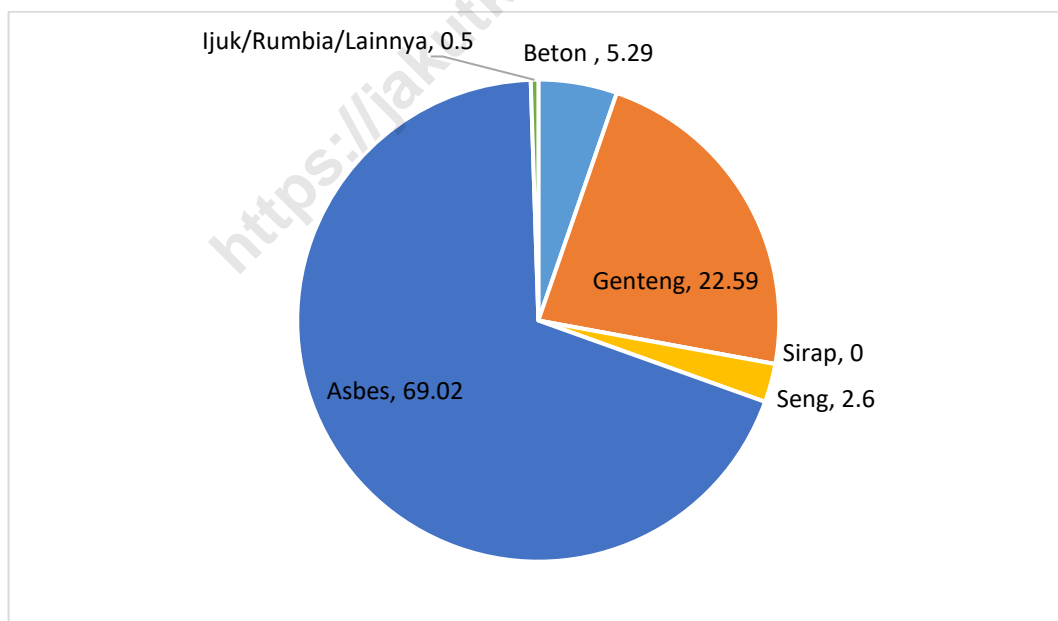
Atap merupakan salah satu bagian paling penting dalam sebuah konstruksi bangunan. Atap berfungsi untuk melindungi rumah dari panas dan hujan serta menghambat pergerakan angin yang membawa debu dan kotoran masuk ke dalam rumah. Pemilihan jenis atap rumah ditentukan oleh kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga dan selera penghuni rumah tersebut.

Tahun 2021, Mayoritas jenis atap bangunan tempat tinggal penduduk DKI Jakarta terbuat dari asbes, kelebihan atap asbes jika dibandingkan dengan atap lainnya yaitu harga yang lebih murah, tidak membutuhkan kayu yang banyak untuk pemasangannya dan juga pemasangannya mudah, sedangkan kekurangan jenis atap asbes

menyebabkan suhu ruangan menjadi lebih panas, pemasangan harus lebih hati-hati karena mudah patah. Sementara kekurangan lainnya adalah pada efek kesehatan, yakni jika digunakan dalam jangka waktu lama, akan menimbulkan efek pada kesehatan, terutama untuk sistem pernafasan, karena bahan utamanya adalah karbon, serat asbes yang terhirup dan masuk ke paru-paru bisa menyebabkan asbestosis (timbulnya jaringan parut di paru-paru).

Penggunaan atap jenis asbes ditahun 2021 sebanyak 69.02 persen, lebih tinggi dibandingkan jenis genteng yang hanya 22.59 persen. Hal ini wajar karena asbes relatif lebih murah dibandingkan genteng karena kualitas genteng jauh lebih baik dibanding asbes. Tabel 6.2 menunjukkan secara lengkap persentase rumah tangga di Kota Jakarta Utara menurut jenis atap terluas yang digunakan.

Gambar 6.2
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Bangunan
Jakarta Utara, 2021 (Persen)



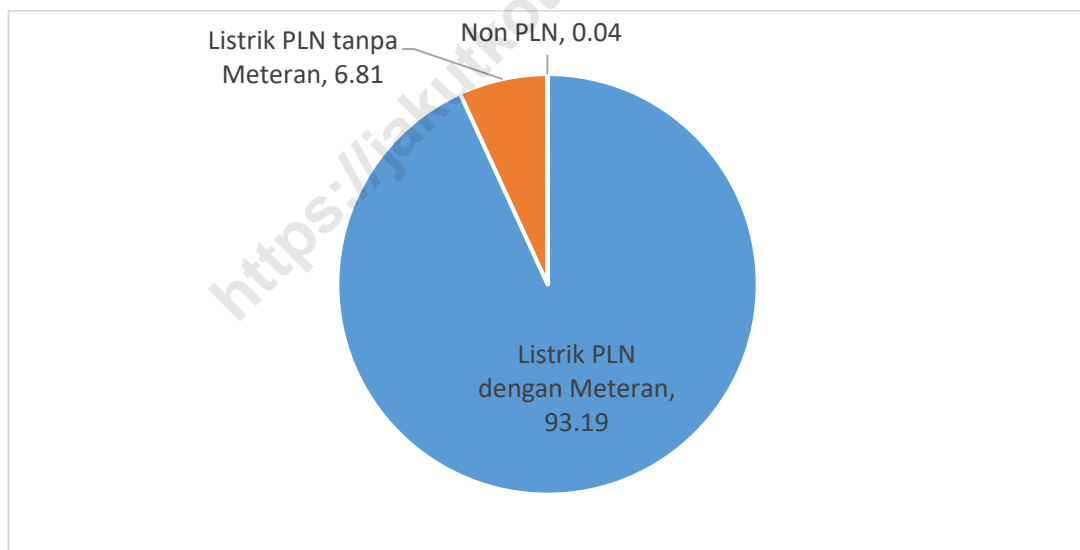
Sumber: Susenas Maret, 2021

6.3 Fasilitas Rumah

Rumah yang sehat harus didukung oleh kelengkapan fasilitas yang memadai, yang pada akhirnya kelengkapan fasilitas tempat tinggal akan menentukan kualitas hidup penghuninya. Fasilitas yang paling mendasar agar sebuah rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya listrik, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, serta jamban dengan tangki septik di dalam rumah tersebut.

Ketersediaan listrik menjadi sangat penting selain pangan. Manfaat listrik untuk kehidupan sudah menjadi kebutuhan primer. Hampir seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari peran listrik. Selain berfungsi sebagai penerangan, semua peralatan rumah tangga membutuhkan listrik seperti AC, lemari es, dan rice cooker.

Gambar 6.3
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Listrik
Kota Jakarta Utara, 2021 (Persen)



Sumber: Susenas Maret 2021

Berdasarkan data Susenas 2021, Seluruh rumah tangga di Kota Jakarta Utara telah mendapat akses listrik dimana 93,19 persen rumah tangga tersebut memiliki akses ke listrik PLN dengan meteran sementara 6,81 persen tanpa meteran. Selain listrik PLN, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN yakni sebanyak 0,04 persen.

Selama lima tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum di Kota Jakarta Utara. Pengguna air kemasan sebagai sumber air minum pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Beragam pilihan, praktis, variasi harga dan manfaat menjadi salah satu sebab masyarakat lebih senang mengkonsumsi air kemasan. Di sisi lain, kenaikan yang signifikan ini dapat dipahami mengingat sulitnya mencari air bersih di Jakarta Utara. Sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik rumah tangga hingga limbah beracun dari industri.

Tabel 6.1
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum
Di Kota Jakarta Utara, 2017 – 2021 (Persen)

Kab/Kota	Sumber Air Minum					Total
	Air Kemasan	Leding	Pompa Air	Sumur/Perigi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Utara						
2017	80,77	19,06	0,00	0,00	0,17	100,00
2018	82,34	17,15	0,33	0,18	0,00	100,00
2019	85,35	14,30	0,35	0,00	0,00	100,00
2020	85,53	13,82	0,57	0,00	0,08	100,00
2021	83,08	16,22	0,45	0,25	0,00	100,00

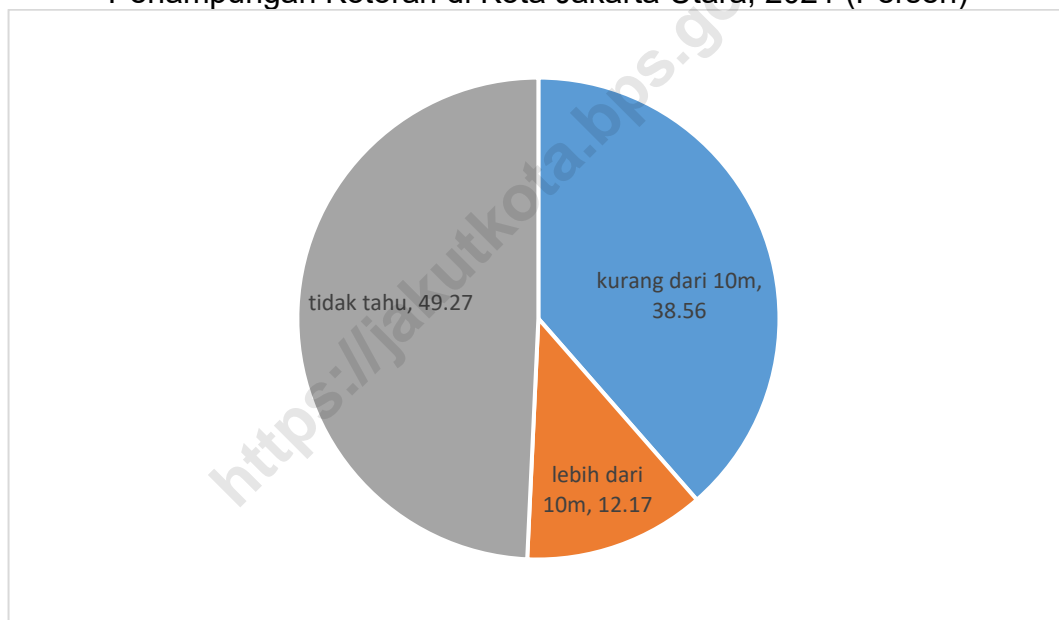
Sumber: Susenas, 2017-2021

Persentase pengguna sumber air minum utama terbanyak kedua di Jakarta Utara, yaitu Leding. Pada tahun 2021, 16,22 persen rumah tangga di Jakarta Utara menggunakan leding sebagai sumber air minum. Peringkat ketiga adalah pengguna pompa air yaitu sebesar 0,45 persen pada tahun 2021.

Air yang telah tercemar dapat menimbulkan penyakit pencernaan seperti kolera, tifus, disentri, cacingan, dan lain-lain dengan gejala diare. Keberadaan E. Coli di air dipengaruhi oleh banyak hal yakni konstruksi fisik sumur, baik dinding sumur, bibir sumur, lantai sumur, dan sarana pembuangan air limbah, serta jarak septic tank dengan sumur gali yang kurang dari 11 meter. Semakin dekat jarak maka semakin besar pula kemungkinan air sumur/pompa tersebut tercemar. Akibatnya derajat higienitas air yang diminum menjadi sangat rendah.

Kondisi jarak pompa/sumur ke penampungan kotoran di Jakarta Utara, dapat dilihat pada Tabel 6.5. Data ini mencerminkan kualitas sanitasi dan kesehatan rumah tangga sekaligus lingkungan tempat tinggal masyarakat. Perkembangan data yang ada menunjukkan separuh populasi rumah tangga di DKI Jakarta memiliki jarak pompa/sumur ke tempat penampungan kotoran kurang dari 10 meter. Semakin padatnya penduduk mengakibatkan semakin rendahnya jarak sumur/pompa ke penampungan kotoran. Tentu saja hal ini menyiratkan bahaya yang akan dihadapi masyarakat Jakarta dari sisi kesehatan.

Gambar 6.4
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Pompa/Sumur ke Penampungan Kotoran di Kota Jakarta Utara, 2021 (Persen)



Sumber: Susenas 2021

Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang mempunyai jarak antara tempat penampungan kotoran dengan sumur yang kurang dari 10 meter adalah 38,56 persen, jarak 10 meter atau lebih sebesar 12,17 persen, dan yang tidak tahu berapa jaraknya sebesar 49,27 persen.

Sementara itu, sumber bahan bakar utama untuk memasak yang terbanyak digunakan oleh masyarakat adalah Gas/LPG yaitu sebesar 90,45 persen. Walaupun ketersediaan minyak tanah di Jakarta sudah semakin

langka, namun masih ada 0,62 persen rumah tangga yang menggunakannya.

Tabel 6.2
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kota Jakarta Utara, 2017 – 2021 (Persen)

Kab/Kota	Bahan Bakar/Energi untuk memasak						Total
	Listrik	Gas/LPG	Gas kota	Minyak tanah	Arang/Briket/Kayu/Lainnya	Tidak pernah memasak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jakarta Utara							
2017	0,15	86,77	0,00	2,50	0,10	10,47	100,00
2018	0,99	92,27	0,00	1,55	0,00	5,19	100,00
2019	1,50	88,27	0,00	1,27	0,00	8,96	100,00
2020	3,16	85,55	0,72	1,62	0,15	8,81	100,00
2021	1,62	90,45	0,00	0,62	0,00	7,30	100,00

Sumber: Susenas, 2017-2021

6.4 Teknologi Komunikasi dan Informasi

Teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

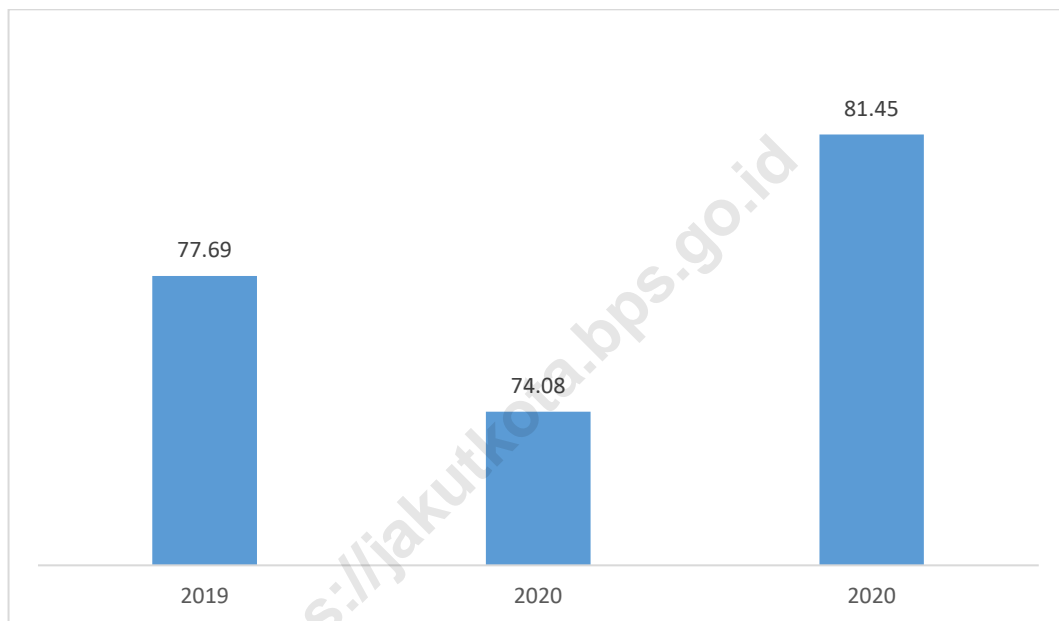
Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu. Orang dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam informasi yang terdapat di belahan dunia tanpa harus datang ke tempat tersebut. Bahkan orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai belahan dunia, dengan memanfaatkan seperangkat komputer yang tersambung internet.

Salah satu kunci kemajuan suatu negara adalah informasi. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari pandainya negara itu mengelola sumber informasi. Sumber informasi harus dapat dimanfaatkan dan diolah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Beberapa peralatan yang bermanfaat sebagai teknologi informasi antara lain internet, komputer/lap

top/notebook, dashbook, handphone (HP).

Dalam era globalisasi saat ini, telepon seluler atau HP merupakan salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern, terutama di perkotaan. Alat komunikasi sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat Kota Jakarta.

Gambar 6.5
Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Memiliki Telepon Seluler
Jakarta Utara, 2019 – 2021 (Persen)

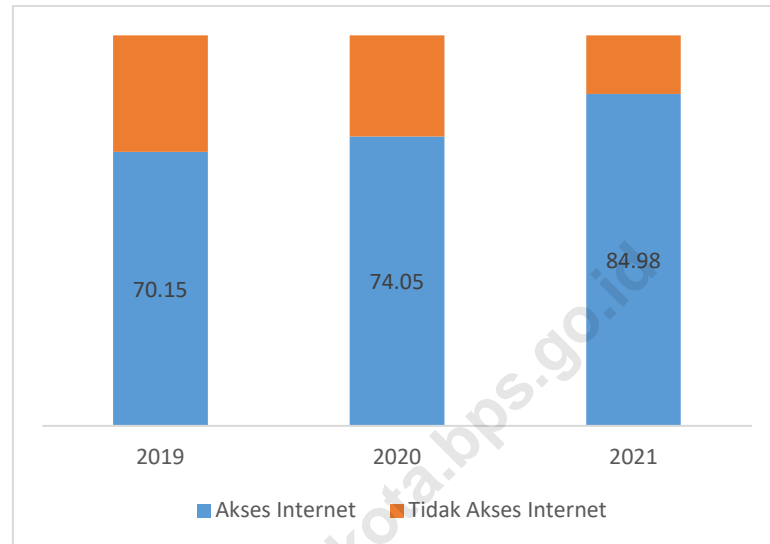


Sumber: Susenas, 2019-2021

Mudahnya teknologi HP menjangkau semua lapisan masyarakat, berimbas pada menurunnya persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah. Pesatnya transformasi HP dari tahun ke tahun menggeser eksistensi telpon rumah. Pada tahun 2021, Kepemilikan telpon seluler (HP) pada penduduk berumur 5 tahun ke atas di Jakarta Utara tahun 2021 sebesar 81,45 persen.

Selain kepemilikan telepon seluler, akses internet juga menjadi kebutuhan utama di era saat ini, hal ini tergambar dengan peningkatan penggunaan internet selama 3 tahun terakhir. Persentase pengguna akses internet pada tahun 2019 yakni sebesar 70,15 persen meningkat hingga 84,98 persen pada tahun 2021.

Gambar 6.6
Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet 3 Bulan
Terakhir Kota Jakarta Utara, 2019 – 2021 (Persen)



Sumber: Susenas, 2019-2021

Penggunaan akses internet di Jakarta Utara juga menunjukkan bahwa penduduk Jakarta Utara menggunakan fasilitas internet cukup intens, baik untuk kepentingan bekerja, rekreasi, sosial, pendidikan, maupun lainnya. Terlebih disaat pandemi akibat Covid-19 dimana bekerja, beribadah dan belajar banyak dikerjakan di rumah seperti sekarang, tentunya kedepannya penggunaan internet masih akan terus terjaga bahkan sangat mungkin terus meningkat. Selain itu banyaknya provider dengan tingkat harga yang bersaing memudahkan masyarakat Jakarta Utara dalam mengakses informasi melalui internet.

BAB VII

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

RUMAH TANGGA

Aspek pendapatan, tingkat konsumsi rumah tangga dan pola konsumsi masyarakat merupakan aspek penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besaran dan pola konsumsi rumah tangga.

Peningkatan pendapatan rumah tangga biasanya akan diikuti oleh pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari konsumsi makanan ke konsumsi bukan makanan (*Engel's Law*). Di negara-negara maju, persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan biasanya berada di bawah 50 persen. Sedangkan komposisi pengeluaran untuk makanan di negara-negara berkembang pada umumnya di atas 50 persen.

Kondisi masyarakat Jakarta sudah mengikuti pola pengeluaran di negara maju, dimana sebagian besar porsi pengeluarannya dibelanjakan untuk kebutuhan selain makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Jakarta lebih tinggi dari kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia. Namun demikian, terlihat proporsi pengeluaran makanan dan non makanan berfluktuasi seiring dengan kondisi perekonomian di ibukota selama kurun waktu tersebut.

Peningkatan pendapatan saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, karena ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan, yakni pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Jika pendapatan meningkat secara umum, namun hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, yang umumnya berada pada kelompok menengah ke atas, maka peningkatan ini menjadi tidak bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah belum dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang benar-benar merata antar kelompok masyarakat adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Usaha yang

mungkin diupayakan adalah memperkecil kesenjangan yang ada antar kelompok masyarakat tersebut.

Dalam upaya memperkecil jurang perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan upaya ini diharapkan pendapatan masyarakat miskin dapat meningkat, dan jurang pendapatan antar kelompok masyarakat dapat diperkecil.

7.1. Distribusi pendapatan, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pendapatan menggambarkan merata atau tidaknya hasil pembangunan suatu daerah yang diterima oleh masing-masing orang/kelompok. Sulitnya memperoleh data pendapatan, menyebabkan pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan data pengeluaran. Analisis distribusi pendapatan disini menggunakan data pengeluaran rumah tangga hasil susenas.

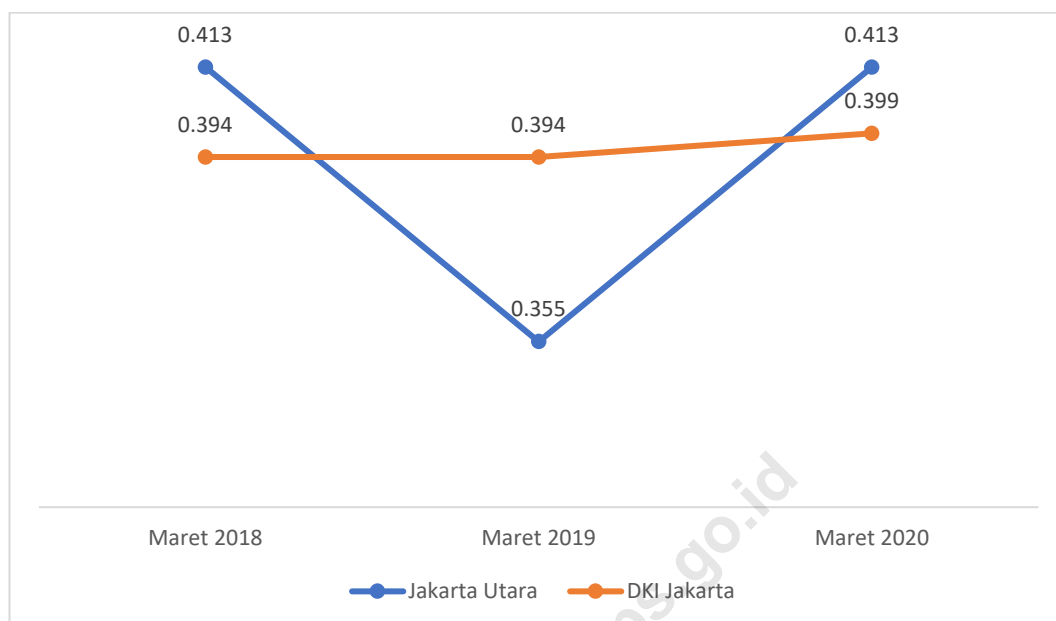
Untuk menilai ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, salah satu alat yang umumnya digunakan sebagai indikator adalah Gini Rasio, serta pengelompokan menggunakan kriteria Bank Dunia. Gini Rasio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang nilainya diantara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai Gini Rasio mendekati 0, kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila nilai Gini Rasio mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap tinggi.

Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, Gini Rasio dibagi ke dalam tiga kategori:

- Gini Rasio $> 0,50$, menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan **tinggi**.
- Gini Rasio $0,4 - 0,5$, menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan **sedang**.
- Gini Rasio $< 0,40$, menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan **rendah**.

Gambar 7.1

Gini Rasio Kota Jakarta Utara dan Provinsi DKI Jakarta, 2018 – 2020



Sumber: Susenas 2018-2020

Gambar 7.1 menunjukkan distribusi Gini Rasio Jakarta Utara dan DKI Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka Gini Ratio DKI Jakarta mengalami tren meningkat hingga mencapai angka 0,399 pada Maret 2020. Begitupun dengan Gini Ratio Kota Jakarta Utara yang sempat menurun pada Maret 2019 namun meningkat kembali pada Maret 2020. Dampak Pandemi Covid-19 terlihat dari pendapatan masyarakat yang semakin timpang dalam wilayah Jakarta.

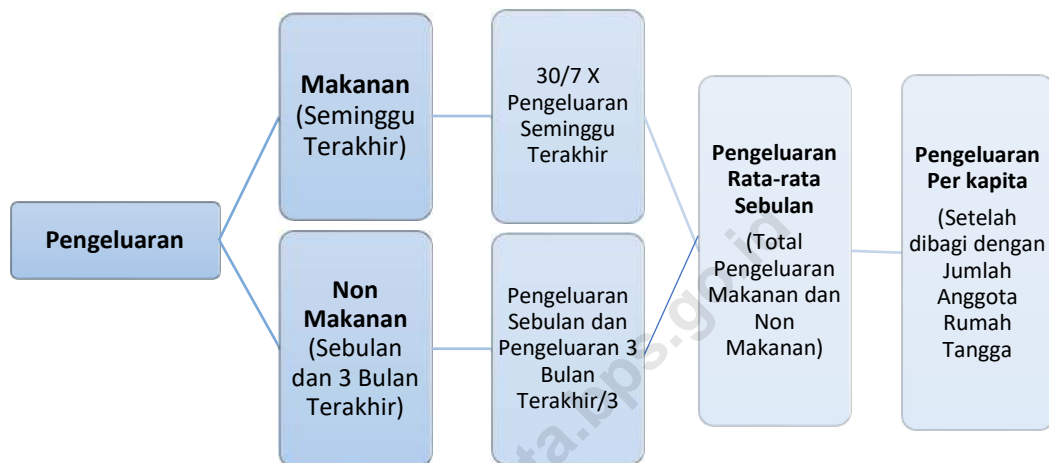
7.2. Pengeluaran per Kapita menurut Jenis Pengeluaran

Data pengeluaran rumah tangga yang telah dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, merupakan salah satu upaya untuk memperoleh gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan.

Data pengeluaran yang dikumpulkan adalah data pengeluaran seminggu atau sebulan yang lalu tergantung pada jenis pengeluarannya. Pengeluaran untuk makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, yang selanjutnya dihitung menjadi rata-rata pengeluaran untuk makanan selama

sebulan. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan meliputi pengeluaran sebulan yang lalu dan 3 bulan yang lalu, selanjutnya dihitung menjadi pengeluaran non makanan rata-rata selama sebulan.

Gambar 7.2
Skema Pengeluaran Rumah Tangga

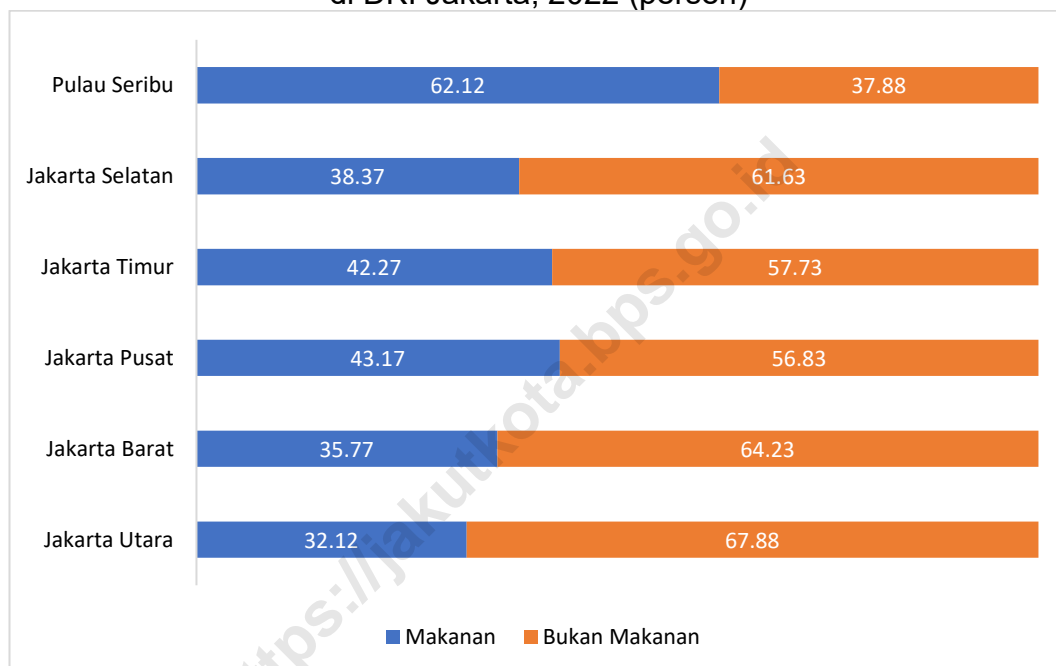


Pola pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat terlihat dari semakin banyaknya proporsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan, begitu pula sebaliknya. Gambar 7.4 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran non makanan penduduk DKI Jakarta tahun 2022 sekitar 62,25 persen, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan sekitar 37,75 persen.

Komposisi pengeluaran makanan dan bukan makanan di setiap kabupaten/kota relatif sama kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Pengeluaran masyarakat Kepulauan Seribu sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan yaitu sebesar 62,12 persen, dan sisanya 37,88 persen untuk non makanan. Perbedaan karakteristik konsumsi di Kepulauan Seribu disebabkan kondisi ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar masuk termasuk kelompok masyarakat dengan golongan pendapatan 40 persen ke bawah se-provinsi DKI Jakarta.

Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki proporsi konsumsi makanan paling kecil dibandingkan kota administrasi lainnya. Proporsi belanja yang dikeluarkan oleh masyarakat di Jakarta Utara sebesar 32,12 persen untuk konsumsi makanan, sementara 67,88 persennya dibelanjakan untuk non-makanan.

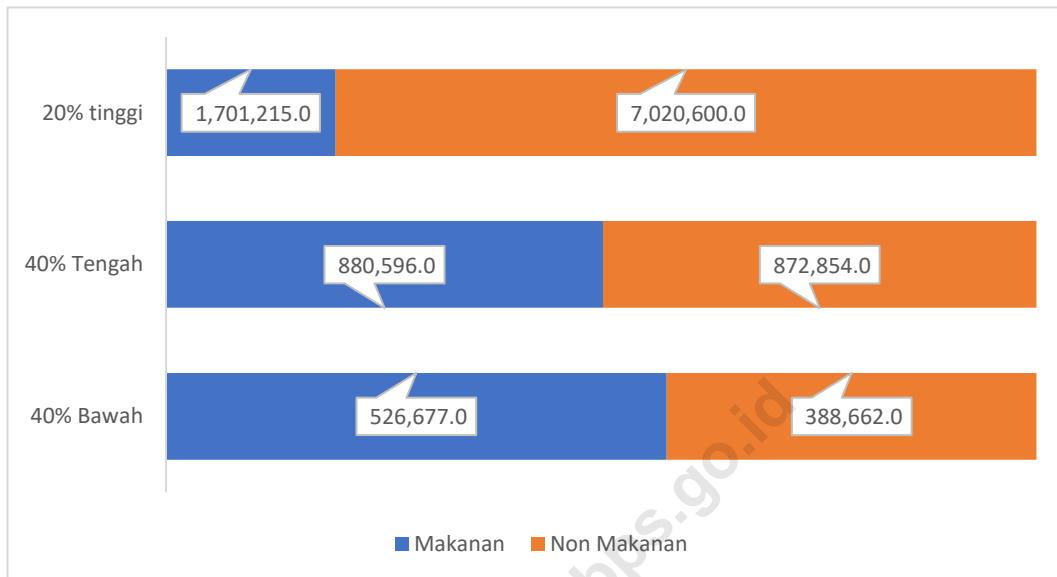
Gambar 7.3
Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022 (persen)



Sumber : Susenas Maret 2022

Secara rata-rata, konsumsi makanan masyarakat Jakarta rata-rata sebesar Rp. 953.321. Sebagian besar pengeluaran ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi, ikan, telur dan susu serta sayuran. Pangsa pengeluaran makanan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran makanan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, pangsa pengeluaran penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya (BPS, 2020).

Gambar 7.4 Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Golongan Pengeluaran per Kapita, Kota Jakarta Utara, 2022 (Persen)



Sumber : Susenas Maret 2022

Gambar 7.4 menggambarkan distribusi pengeluaran rata-rata sebulan untuk konsumsi makanan dan non-makanan yang dibedakan menurut jenis pengeluaran dan golongan pengeluaran per kapita (makanan dan non makanan). Terlihat pada gambar, semakin rendah golongan pengeluaran per kapita semakin tinggi distribusi pengeluaran makanan dan sebaliknya. Golongan pendapatan terendah, dari total pendapatannya 57,53 persen diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sisanya 42,46 persen untuk non makanan. Sementara pada golongan pendapatan tertinggi porsi pengeluaran makanan sangat kecil, yaitu sebesar 19,51 persen. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa secara rata-rata pengeluaran makanan masyarakat Kota Jakarta Utara sebesar 32,12 persen dan non makanan 67.88 persen.

BAB VIII

KEMISKINAN DAN INDIKATOR LAINNYA

Tujuan pembangunan nasional dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dan salah satu dari indikator kesejahteraan umum dalam tujuan pembangunan nasional tersebut adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pembangunan nasional seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, tidak ada perbedaan antar penduduk dan antar wilayah. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya perbedaan tingkat kesejahteraan baik antar penduduk maupun antar wilayah di Indonesia pada umumnya, atau di DKI Jakarta pada khususnya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keterbandingan tingkat kesejahteraan antar wilayah adalah angka kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah, semakin rendah tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Selain kemiskinan, rasa aman pun dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Rasa aman dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk dapat beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Semakin aman suatu daerah, diasumsikan semakin sejahtera secara batiniah warganya.

8.1 Kemiskinan

Ada banyak definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh berbagai pihak seperti Bappenas. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep “*basic needs approach*” (pendekatan kebutuhan dasar), dan mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sebagai permasalahan global, pengurangan penduduk miskin merupakan tujuan bersama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2018 yang menguraikan tujuan global Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), disebutkan bahwa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, sebagai tujuan yang pertama.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan suatu konsep kemiskinan yang jelas. Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan standar kehidupan minimum. Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 Kkal per kapita per hari. GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, GK adalah sejumlah uang untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 Kkal per hari dan keperluan mendasar bukan makanan.

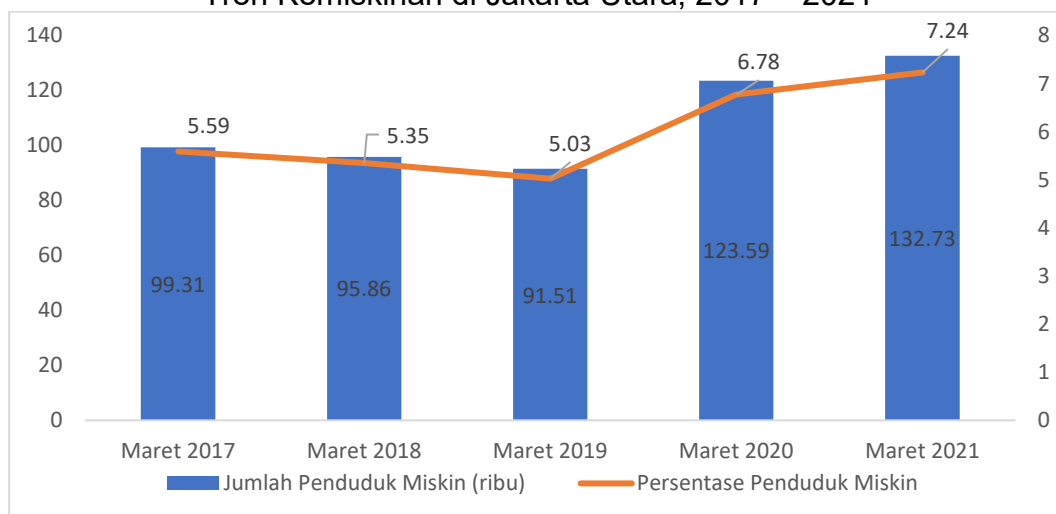
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Selain Indonesia, pemakaian konsep 2.100 kilo kalori per hari ini juga digunakan oleh beberapa negara lain seperti Thailand, Vietnam, India, dan beberapa negara berkembang lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam menghitung GK adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditambah dengan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Penghitungan yang didasarkan pada hasil survei menyebabkan angka kemiskinan yang dihitung dengan GK

hanya bersifat estimasi atau disebut sebagai data makro. Data kemiskinan makro tidak dapat memberikan informasi siapa dan dimana penduduk miskin itu berada. Data kemiskinan makro digunakan untuk pertama, mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, kedua membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah, dan ketiga menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki status kemiskinan mereka. Data kemiskinan makro hanya memberikan informasi angka kemiskinan hingga level kabupaten/kota.

Jumlah penduduk miskin selain dipengaruhi oleh garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Seperti kita ketahui bahwa sebagian dari mereka yang berada di seputaran garis kemiskinan pada umumnya bekerja di sektor informal. Mereka sangat rentan, dapat jatuh ke bawah garis kemiskinan atau naik melampaui garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi membaik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka proyek-proyek berjalan dengan lancar dan mereka dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Tetapi apabila ekonomi memburuk dan proyek-proyek tidak berjalan atau terlambat dijalankan maka sebagian dari mereka bisa menjadi tidak bekerja dan menjadi miskin. Inflasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, termasuk di Kota Jakarta Utara.

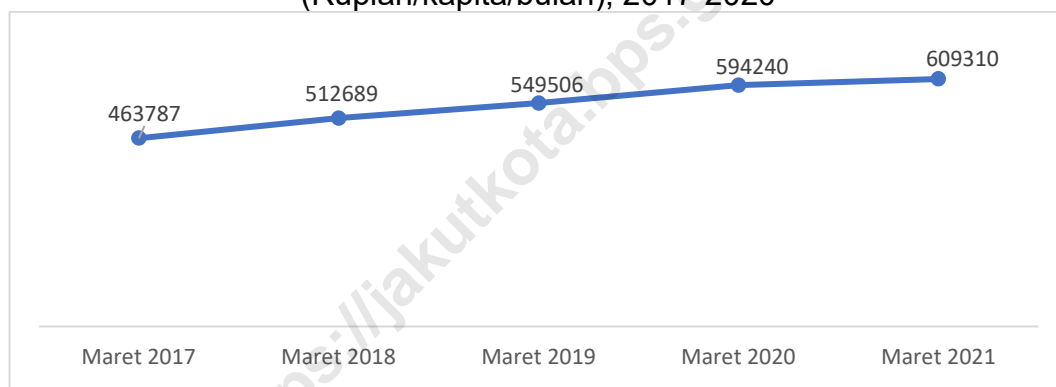
Gambar 8.1
Tren Kemiskinan di Jakarta Utara, 2017 – 2021



Sumber: Susenas Maret, 2017-2021

Secara umum, sejak Maret 2017 hingga sebelum pandemi, tingkat kemiskinan Kota Jakarta Utara sudah berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada periode Maret 2019 ke Maret 2020, dipicu oleh pandemi COVID-19. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 6,78 persen, meningkat 1,75 persen poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 5,03 persen. Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 132,73 ribu orang setara dengan 7,24 persen dari total penduduk Jakarta Utara, meningkat 9,14 ribu orang dibanding Maret 2020 yang sebanyak 123,59 ribu orang.

Gambar 8.2
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kota Jakarta Utara
(Rupiah/kapita/bulan), 2017-2020



Sumber: Susenas Maret 2017-2021

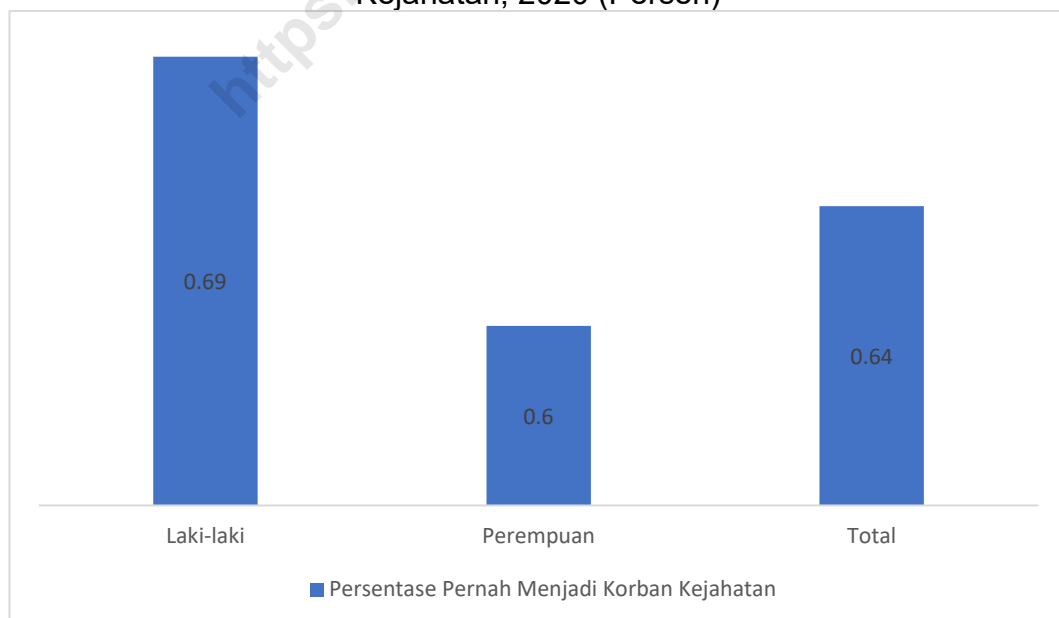
Sulitnya pemulihan daya beli penduduk akan menyebabkan kesulitan pula bagi penduduk miskin untuk dapat melewati garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2021 (Gambar 8.2) tercatat sebesar Rp609.310 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya sejak Maret 2017. Pada Maret 2021 terjadi kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 2,54 persen dibandingkan Maret 2020.

8.2 Kriminalitas

Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dalam kehidupannya, diperlukan upaya agar hak-hak dasar manusia dapat terpenuhi. Selain terpenuhinya kebutuhan pangan, termasuk dalam hak dasar manusia adalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan. Selain itu diperlukan juga rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, selain hak lain yang berupa partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Tindakan kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.

Gambar 8.3
Persentase Penduduk Menurut Apakah Pernah Menjadi Korban
Kejahatan, 2020 (Persen)



Sumber: Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020 persentase penduduk Kota Jakarta Utara yang pernah menjadi korban kejahatan sebanyak 0,64 persen dari total penduduk. Pemerintah Daerah dan aparat berwenang mampu memberikan perlindungan terhadap warga Kota Jakarta Utara, dimana sebanyak 99,31 persen penduduk Kota Jakarta Utara tidak pernah menjadi korban kejahatan selama tahun 2020. Bila dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan dibanding dengan perempuan. Dimana laki-laki yang menjadi korban kejahatan sebanyak 0,69 persen, lebih tinggi dibanding perempuan yang mencapai 0,60 persen

<https://jakutkota.bps.go.id>

BAB IX

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat suatu wilayah tentunya tidak hanya dicapai oleh satu atau dua tahun pembangunan, namun proses tersebut memerlukan rentang waktu yang lebih panjang dan berkesinambungan. Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya telah banyak kemajuan di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan teknologi komunikasi serta bidang lainnya.

Pada tahun 2022, pandemi COVID-19 masih berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Datangnya pandemi sejak Maret tahun 2020, membuat pemerintah harus mencari jalan terbaik, menjaga kesehatan masyarakat dengan tetap berupaya menggerakkan roda perekonomian dan kehidupan sosial yang layak.

Pemberlakuan kebijakan PSBB yang dilanjutkan dengan PPKM dipilih oleh pemerintah dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Tentunya kebijakan ini disadari dapat mengurangi aktivitas usaha/perusahaan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan berbagai program kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dan vaksinasi massal yang terbukti menjadi pengungkit proses pemulihan perekonomian.

BPS yang secara rutin melakukan berbagai kegiatan survei seperti SUSENAS Maret 2021 dan SAKERNAS Agustus 2021, menangkap dampak pandemi COVID-19 di DKI Jakarta terhadap perkembangan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam bab ini akan ditekankan kembali perkembangan indikator kemiskinan maret 2021 dan ketenagakerjaan agustus 2021.

9.1 Kemiskinan dan Gini Ratio Maret 2021

Secara umum, sejak Maret 2018 hingga sebelum pandemi, tingkat kemiskinan Jakarta sudah berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada periode Maret 2019 ke Maret 2020, dipicu

oleh pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin di Kota Jakarta Utara pada Maret 2021 bertambah 9,14 ribu menjadi 132,73 ribu orang.

Sulitnya penduduk miskin meningkatkan pendapatan dan daya beli di tengah pandemi, menjadi ancaman lonjakan kemiskinan yang sebenarnya mungkin saja terjadi. Namun, bantuan sosial COVID-19 masih dapat meredam laju pertumbuhan kemiskinan. Selain bantuan sosial dari pemerintah pusat, penduduk rentan di Jakarta juga mendapat bantuan sosial dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, angka Gini Ratio Jakarta Maret 2020 mencapai 0,413 atau naik sebesar 0,058 bila dibandingkan Maret 2019. Semakin melebarnya gini ratio menunjukkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin lebar. Gini ratio yang sudah melebihi 0,40 sebagai batas distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah, harus menjadi *warning*. Masih naiknya ketimpangan di tengah pandemi disebabkan oleh tingginya kemampuan kelompok penduduk menengah atas memenuhi kebutuhan dan melakukan investasi. Di sisi lain, masyarakat miskin dan hampir miskin masih kesulitan meningkatkan daya belinya.

9.2 Ketenagakerjaan Agustus 2022

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 9,84 persen menurun 1,95 persen bila dibandingkan dengan Agustus 2021 seiring dengan redanya pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan percepatan proses pemulihan ekonomi agar pengangguran bisa ditekan

Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga sangat terdampak pandemi yang terjadi. TPAK Agustus 2022 turun sebesar 0,22 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2021.

Secara umum dapat dikatakan kondisi ketenagakerjaan di Agustus 2020-2021 sangat terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi. Diperlukan kerja keras Pemerintah untuk percepatan program pemulihan ekonomi sambil menekan kasus Covid-19 yang terjadi.

ST 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAKARTA UTARA**

Jl. Berdikari I No 1 Kel Rawa Badak Utara
Kec. Koja, Jakarta Utara
Telp. +62 21 22494346
Homepage : <http://jakutkota.bps.go.id>
E-mail : bps3175@bps.go.id